



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

RENCANA KERJA (RENJA)
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
TAHUN 2026





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan Perkebunan sekaligus meningkatkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun ke depan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang inovatif, diharapkan sub sektor perkebunan mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun, berkontribusi positif terhadap perekonomian dan mampu menjadi penopang cita-cita transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 12 September 2025

Plt Kepala,


Andi Siddik S.P, M.Ling
NIP. 19710518 200003 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN..	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	46
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	82
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	82
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	86
3.3. Program dan Kegiatan.....	88
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	113
4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....	114
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang disesuaikan.....	114
BAB V PENUTUP.....	143
Lampiran	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
2.1	Rekapitulasi Pemenuhan Sarana Perkebunan Rakyat Tahun 2024.....	9
2.2	Lokasi dan Penerima Manfaat Pemenuhan Sarana Perkebunan Tahun 2024.....	11
2.3	Rekapitulasi Pengawasan Peredaran Benih Tahun 2024.....	18
2.4	Rekapitulasi Penambahan Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024	19
2.5	Luas Area yang Ditangani Tahun 2024	19
2.6	Luas Areal Perkebunan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Akibat Serangan OPT Tahun 2024	21
2.7	Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2024.....	22
2.8	Daftar Sumber Daya Manusia Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	23
2.9	Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	24
TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	27
TC.30	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	46
2.10	Permasalahan Perkebunan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	49
2.11	Identifikasi Isu - isu Menurut Dinamika Global, Nasional dan Regional	56
TC.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur	58
3.1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja sasaran Program Ditjen Perkebunan	86
3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026	88

TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	93
4.1	Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....	114
4.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....	115

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
3.1	Rumah Strategis Kementerian Pertanian	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diikuti oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan renja PD tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2026;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2026; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni sebesar Rp. 91.115.131.294,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 47.526.538.168,- dan program pembangunan sebesar Rp. 43.588.593.126,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menjadi Rp. 94.827.902.847,- (bertambah Rp. 3.712.771.553) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 51.251.909.721,- dan program pembangunan sebesar Rp. 43.575.993.126,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 88.673.035.592,83,- (93,51%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 48.816.256.889,- (95,25%) belanja pembangunan sebesar Rp. 39.856.778.704,- (91,46%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp48.816.256.889,- dari pagu 51.251.909.721,- dengan capaian keuangan 95,25%. Program ini memiliki output:

- a) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti, dengan capaian sebagai berikut:
 - Dinas Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Pengawasan Benih Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
 - UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
Dari target 100% terealisasi 100% atau 100%.
- b) Indeks Kualitas Layan Kesekretariatan, dengan capaian sebagai berikut:
 - Dinas Perkebunan

Dari target 78,93% terealisasi 95,77% atau 121,34%.

- UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Dari target 86% terealisasi 98,10% atau 114,24%.

- UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dari target 79% terealisasi 97,80% atau 124%.

- UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Dari target 80% terealisasi 97,40% atau 121,75%.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.986.574.820,- dari pagu Rp. 24.754.994.050,- dengan capaian kinerja keuangan 88,82%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 16.819.731.444,- dari pagu dana Rp. 19.539.925.010,- dengan capaian kinerja keuangan 86,08%. Indikator kinerja program ini adalah tingkat pemenuhan sarana perkebunan dengan capaian 25% atau 98,58% dari target 25,36%. Capaian ini diperoleh dari persentase pemenuhan pupuk untuk perkebunan rakyat sebesar 23,66% dan pemenuhan benih untuk perkebunan rakyat sebesar 1,34% dengan melaksanakan:

1. Perluasan seluas 430 Ha;
2. Peremajaan seluas 350 Ha;
3. Intensifikasi seluas 1.950 Ha; dan
4. Rehabilitasi seluas 50 Ha

Pada tahun 2024 pemenuhan pupuk melalui bantuan yang diserahkan kepada masyarakat mencapai 2.780 Kg dari kebutuhan pupuk 2.820 Kg dan pemenuhan benih mencapai 3.759.900 benih dari kebutuhan benih sebanyak 112.526.786 benih. Dimana pemenuhan sarana perkebunan tersebut mencakup 8 komoditi yang terdiri dari: Kelapa Sawit, Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Aren, Pala dan Kopi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pemenuhan Sarana Perkebunan Rakyat Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
1	[#] Intensifikasi Aren 50 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
2	[#] Intensifikasi Kakao 100 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
3	[#] Intensifikasi Karet 200 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	20 Kg
4	[#] Intensifikasi Kelapa 100 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
5	[#] Intensifikasi Kelapa Sawit 300 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1.5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	30 Kg
6	[#] Intensifikasi Lada 150 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	750 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	15 Kg
7	[#] Intensifikasi Pala 50 Ha	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
8	[#] Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	50 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
9	[#] Peremajaan Kebun Karet 300 Ha	

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
	Benih Karet Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	150 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	1.5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	30 Kg
10	 [#] Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha	
	Benih Lada Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	80 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
11	 [#] Intensifikasi Kelapa Sawit 1.500 Ha (Major Project)	
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	5 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	150 Kg
12	 [#] Perluasan Areal Aren 25 Ha	
	Benih Aren Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	5 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	125 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifikasi: Pupuk Majemuk (NPK)	2.5 Kg
13	 [#] Perluasan Areal Kakao Mahakam Ulu 25 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	25 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	125 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	2.5 Kg
14	 [#] Perluasan Areal Kakao 100 Ha	
	Benih Kakao Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	100 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
15	 [#] Perluasan Areal Karet 100 Ha	
	Benih Karet Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	50 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk	10 Kg

No.	Uraian Kegiatan	Volume Bantuan
	Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	
16	[#] Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha	
	Benih Sawit Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	13 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	500 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	10 Kg
17	[#] Perluasan Areal Kopi 20 Ha	
	Benih Kopi Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	20 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	100 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	2 Kg
18	[#] Perluasan Areal Lada 20 Ha	
	Benih Lada Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	80 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg
19	[#] Perluasan Areal Pala 50 Ha	
	Benih Pala Siap Tanam Spesifikasi: Berlabel Siap Salur	5 Batang
	Herbisida Spesifikasi: Herbisida	250 Liter
	Pupuk Majemuk Spesifik: Pupuk Majemuk (NPK)	5 Kg

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi (2024)

Dimana rincian penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Lokasi dan Penerima Manfaat Pemenuhan Sarana Perkebunan Tahun 2024

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
1.1	Intensifikasi Aren 50 Ha					
1.	Sama Rasa	Parlan	Ds. Kedang Ipil, Kec. Kota Bangun	Kukar	25	25
2.	Keliran Jaya	M. Hutadin	Ds. Tuana Tuha, Kec. Kenohan	Kukar	15	25
1.2	Intensifikasi Kakao 100 Ha					

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
1.	KWT. Sumber Rejeki	Siti Faikah	Ds. Sumber Sari, Kec. Kota Bangun	Kukar	25	25
2.	Bangen Tawai	Ajang	Ds. Rantau Sentosa, Kec. Busang	Kutim	28	37
3.	Sungai Anai	Harifin Apui	Ds. Rantau Sentosa, Kec. Busang	Kutim	32	38
1.3	Intensifikasi Karet 200 Ha					
1.	Sabar Subur	Hartoyo	Ds. Tempakan, Kec. Batu Engau	Paser	28	28
2.	Sederhana	Sumarli	Ds. Busui, Kec. Batu Sopang	Paser	18	30
3.	Tani Maju	Muhammad Yusri	Kel. Bentuas, Kec. Palaran	Samarinda	15	15
4.	Sinar Tani V	Wolter	Kmp. Mencimai, Kec. Barong Tongkok	Kubar	10	16
5.	Tepian Pering	Jumiah	Ds. Bakungan, Kec. Loa Janan	Kukar	13	15
6.	Alam Subur	Wildan Hafiz	Ds. Sambera Baru, Kec. Marangkayu	Kukar	18	35
7.	Karya Bersama	Muhammad Amin	Ds. Sebuntal, Kec. marangkayu	Kukar	10	16
8.	Tawakal	Helman Wahyudi	Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur	Balikpapan	18	20
9.	Jalan Beimbai	Masransyah	Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur	Balikpapan	14	25
1.4	Intensifikasi Kelapa 100 Ha					
1.	Radak Sangkong	Dami	Kmp. Muara Tae, Kec. Jempang	Kubar	20	20
2.	Sinar Jaya	Sappe	Kel. Tanjung Tengah, Kec. Penajam	PPU	32	46
3.	Karya Bina Bersama	Iwan Priyanto Irza	Kel. Handil Baru, Kec. Samboja	Kukar	19	19
4.	Tunas Muda	Abdul Rahman	Kel. Handil Baru, Kec. Samboja	Kukar	15	15
1.5	Intensifikasi Kelapa Sawit 300 Ha					
1.	Daya Taka	Yapan	Kel. Sepan, Kec. Penajam	PPU	21	35
2.	Masa Kini	Muhlis	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	24	25
3.	Mekar Sari	Muliadi	Ds. Teluk Muda,	Kukar	14	20

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Kec. Kenohan			
4.	Mongoh Raya	Fitriansyah	Ds. Kahala, Kec. Kenohan	Kukar	15	20
5.	Hambau Berseri	Ikhwan Nur	Ds. Hambau, Kec. Kembang Janggut	Kukar	11	10
6.	Ketapang Jaya	Ilmi Prasetyo	Ds. Pelawan, Kec. Sangkulirang	Kutim	30	30
7.	Suka Maju	Sigit Al Jihat	Ds. Bumi Jaya, Kec. Kaubun	Kutim	35	50
8.	Makmur Bersama	M. Sidik	Kmp. Jambuk Makmur, Kec. Bongan	Kubar	20	30
9.	Bina Keluarga	Musmulyadi	Kmp. Penawai, Kec. Bongan	Kubar	25	25
10.	Cipta Karya	Akhmad Wahyudi	Kmp. Bukit Harapan, Kec. Bongan	Kubar	23	25
11.	Maju Bersama	Udil Thamrin S.	Kmp. Muara Gusik, Kec. Bongan	Kubar	26	30
1.6	Intensifikasi Lada 150 Ha					
1.	Jaya Kasih	Sius	Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung	Berau	14	13
2.	Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kmp. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung	Berau	11	12
3.	Semoga Berkah	Yasmin	Kmp. Merancang Ilir, Kec. Gng Tabur	Berau	21	21
4.	Maju Bersama	Fathur Rizal	Kmp. Teluk Semanting	Berau	27	15
5.	Harapan Sejahtera	Ali Maskur	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	9
6.	Bunga Pisang	Muksin	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	5
7.	Bunga Salak	Sarip	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	5
8.	Tanah Leluhur	Basir	Kel. Karang Joang	Balikpapan	3	2
9.	Sapo Jaya Mandiri	Supardi	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	5
10.	Mekar Maju	Lane Supandi	Kel. Karang Joang	Balikpapan	10	6
11.	Mekar Bakti	Salla	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	3
12.	Mekar Tani Sejahtera	Nafiah	Kel. Karang Joang	Balikpapan	6	4
13.	Sumber Rejeki	Basriawan	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	10

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
14.	Mawar	H. Hannase	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	20
15.	Sukses Abadi	Jumasaha	Kmp. Bukit Harapan, Kec. Loa Janan	Kukar	20	20
1.7	Intensifikasi Pala 50 Ha					
1.	Mitra Tani	Busman	Kmp. Teluk Sumbang, Kec. BidukBiduk	Berau	25	50
1.8	Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha					
1.	Mega Buana	Basri. B	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	12	12
2.	Tunas Baru	H. Syarifuudin	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	17	17
3.	Harapan Sejahtera	Ali Maskur	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	14	13
4.	Mekar Tani Sejahtera	Nafiah	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	5	2
5.	Mekar Maju	Lane Supandi	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	7	3
6.	Mekar Bakti	Salla	Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara	Balikpapan	4	3
1.9	Peremajaan Kebun Karet 300 Ha					
1.	Tuah Abadi II	Seti Warno	Kmp. Linggang Amer, Linggang Bigung	Kubar	50	50
2.	Bina Usaha II	Bonuifasius Dion	Kmp. Linggang Bigung Baru	Kubar	25	25
3.	Cinta Jaya III	Y. Watas M	Kmp. Linggang Melapeh	Kubar	25	55
4.	Suka Abadi	Dermansyah	Kmp. Linggang Melapeh Baru	Kubar	33	33
5.	Suka Tani II	Rustinawari. M	Kmp. Ombau Asa	Kubar	26	26
6.	Mitra Tani VI	Rusmanto	Kmp. Belempung Ulaq	Kubar	37	37
7.	Abadi Jaya IV	Inocentius Kadis	Kmp. Juhan Asa	Kubar	20	20
8.	Sido Mulyo I	Supadmono	Kmp. Sumber Rejo	Kubar	21	25
9.	Cahaya Noor V	Nurhayati	Kmp. Sekolaq Darat	Kubar	29	29
1.10	Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha					
1.	Sentosa Sejahtera	Peridis	Ds. Tantau Sentosa, Kec.	Kukar	59	50

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Busang			
1.11	Intensifikasi Kelapa Sawit (Major Project) 1.500 Ha					
1.	Bina Bersama	Yoso Wiyono	Ds. Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Paser	16	40
2.	Margo Dadi	Armansyah	Ds. Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Paser	19	52
3.	Jaya Mulya	Nardi	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	18	20
4.	Mantap Karya	Warsito	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	17	50
5.	Tunas Pasir	Miyarto	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	21	50
6.	Bila Mana	Badriansyah	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	21	50
7.	Suka Tentrem	Barman Sukirman	Ds. Krayan Makmur. Kec. Long Ikis	Paser	22	50
8.	Sari Utama	Luther Sattu	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	14	21
9.	Maju Tani	Bukholif	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	35	55
10.	Tani Makmur	Donatus Nei	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	23	35
11.	Sekar Sari	Eduardus Egho	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	18	28.5
12.	Suka Damai	Arnoldus Ado	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	22	35.5
13.	Sari Bumi	Mesno	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	17	27
14.	Maju Jaya	Widodo	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	20	33
15.	Hidup Rukun	Sukadi	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	15	23
16.	Sudi Makmur	Yuli Riyanto	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	24	36.5
17.	Daya Taka	Idrus Daud	Ds. Kayungosari, Kec. Long Ikis	Paser	20	30.5

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
18.	Karya Taruna	Sukarno	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	16	38
19.	Eka Prasetya	Saidi	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	17	42
20.	Karya Daya Taka B	M. Ramli	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	42
21.	Karya Utama	Sugeng	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	42
22.	Sumber Rejeki	Sani B	Ds. Klempang Sari, Kec. Kuaro	Paser	18	48
23.	Buern Taka	Rahmad Hanafi	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	18	27
24.	Akat Berayak	Rowi Karwita	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	13	20
25.	Penyombolum Taka	Darmanto	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	15	23
26.	Buen Were	Rofiq' Udin	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	19	28.5
27.	Taka Bekerai	Kardianto	Ds. Padang Jaya, Kec. Kuaro	Paser	15	22.50
1.12	Perluasan Areal Aren 25 Ha					
1.	Sante'au	Yahya Wijaya P	Kmp. Linggang Kebut	Kubar	25	25
1.13	Perluasan Areal Kakao 100 Ha					
1.	Sumber Makmur	Pujar Aji Prasetyo	Ds. Sungai Payang, Kec. Loa Kulu	Kukar	16	15
2.	Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kmp. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung	Berau	11	20
3.	Tunas Muda	Pilipus Sardinskyah	Kmp. Sekolaq Darat, Kec.Sekolaq	Kubar	15	15
4.	Karya Mandiri I	Bertolomeus M	Kmp. Linggang Amer	Kubar	12	12
5.	Karya Indah II	Anus	Kmp. Linggang Amer	Kubar	25	38
1.14	Perluasan Areal Kakao Mahakam Ulu 25 Ha					
1.	Mambes 3	Herylianus Gubtur	Kmp. Mamahak Besar	Mahulu	20	12.5
2.	Mambes 4	Rovianus Madang	Kmp. Mamahak Besar	Mahulu	20	12.5
1.15	Perluasan Areal Karet 100 Ha					
1.	Poros Permai	Agus Salim	Kmp. Nguyub Ulu, Kec. Tering	Kubar	25	30
2.	Tipak Permai	Asmadi	Kmp. Nguyub Ulu, Kec. Tering	Kubar	25	25
3.	Jantur Lungau	Yanto	Kmp. Pepas	Kubar	25	25

No.	Kelompok Tani	Ketua	Alamat (Desa/ Kamp/ Kelurahan/ Kecamatan)	Kab/Kota	Jumlah KK	Luas (Ha)
			Eheng, Kec. Barong T			
4.	KWT.Kelumpang Bercahaya	Eli Yati	Kmp. Kelumpang	Kubar	17	20
1.16	Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha					
1.	Tebru Membangun	Wahyudi	Ds. Tebru Paser Damai, Kec. Bt Engau	Paser	20	35
2.	Karya Usaha	Hj. Aisyah	Ds. Rintik. Kec. Babulu	PPU	19	25
3.	Pilar Jaya	Bana	Kel. Sepan Kec. Penajam	PPU	31	40
1.17	Perluasan Areal Kopi 20 Ha					
1.	Jelawet Jaya	Indrawansyah	Kmp. Linggang Tutung	Kubar	10	10
2.	Kmp. Kopi Luawak	Rindoni	Ds. Prangat Baru. Kec.Marangkayu	Kukar	5	10
1.18	Perluasan Areal Lada 20 Ha					
1.	Pesona Lestari	Yanorol	Kmp. Suakong, Kec. Bentian Besar	Kubar	15	5
2.	KWT. Berkat Mandiri	Saldiana	Kmp. Kelian, Kec. Damai	Kubar	10	5
3.	Tunas Mekar	H. Kasman	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	10
1.19	Perluasan Areal Pala 50 Ha					
1.	Bersama	H. Abd. Rauf	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	12	7.5
2.	Mega Buana	Basri. B	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	7
3.	Jaya Raya	Ahmad	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	10	7
4.	Masa Kini	Muhlis	Ds. Batuah, Kec. Loa Janan	Kukar	15	8.5
5.	Mentum Jaya	Willy F Cerda	Kmp. Linggang Melapeh Baru	Kubar	15	10
6.	Sumber Usaha	Kurdiman	Kmp. Linggang Mapan	Kubar	10	10

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi (2024)

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dari pagu sebesar Rp. 4.052.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.013.506.513,- atau 99,03%. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat dengan realisasi 95,01% atau 100,01% dari target 95%. Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah benih salur yang tersertifikasi dibagi dengan kebutuhan benih untuk perluasan Perkebunan rakyat. Pada tahun 2024

jumlah benih yang tersertifikasi sebanyak 354.140 benih dengan kebutuhan benih untuk pengembangan sebanyak 372.750 benih.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 1.153.336.863,- atau 99,23% dari pagu Rp. 1.162.309.040,-. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah benih perkebunan yang diawasi peredaranya dengan capaian sebanyak 12.460.941 benih atau 207,68% dari target 6.000.000 benih. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pengawasan Peredaran Benih Tahun 2024

No.	Komoditi	Jumlah Pengawasan Benih
1	Kalapa Sawit	11.096.449
2	Lada	98.000
3	Karet	202.000
4	Aren	22.075
5	Kelapa	38.168
6	Kakao	777.853
7	Pala	24.000
8	Kopi	177.396
9	Benih Ilegal (Lada)	25.000
	TOTAL	12.460.941

Sumber: UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (2024)

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 372.448.408,- dari pagu Rp. 435.780.000,- (85,47%) dengan output pelaksanaan program luas kebun yang dibangun seluas 52.381 Ha dari target 50.702 Ha atau 103,31%. Rincian penambahan luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Penambahan Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024

No.	Komoditi	Luas (Ha)		Penambahan (Ha)
		2023*)	2024**)	
1.	Kelapa Sawit	1.411.861	1.473.772	
2.	Karet	123.776	115.717	
3.	Kakao	7.777	7.630	
4.	Kelapa dalam	20.068	19.624	
5.	Lada	8.031	7.729	
6.	Kopi	1.495	1.325	
7.	Komoditi Lain	2.668	2.550	
Total		1.575.966	1.628.347	52.381

Sumber: Statistik Perkebunan (2024) *) Angka Tetap 2022 **) Angka Tetap 2023

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.931.967.140,- dari pagu Rp. 7.540.801.250,- dengan capaian kinerja keuangan 91,93%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 5.742.777.830,- atau 90,75% dari pagu dana Rp. 6.327.817.950,-. Output program ini adalah persentase luas areal Perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) dengan capaian sebesar 100,31% atau 100,31% dari target 100%. Capaian ini dihitung dari area yang ditangani sebesar 144.444 Ha di bagi dari dengan area terdampak seluas 144.000 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Luas Area yang Ditangani Tahun 2024

No.	Aksi/ Lokasi	Luas (Ha)
I	Review peta indikatif ANKT Kab. Berau	83.000
II	Review peta indikatif ANKT Kab. Penajam Paser Utara	2.454
III	Review peta indikatif ANKT Kab. Paser	16.461
IV	Monitoring ANKT di Area Perkebunan	4.562
V	PBS yang melaksanakan mitigasi GRK	34.315,38

No.	Aksi/ Lokasi	Luas (Ha)
	berbasis limbah POME	
1.	Kab. Berau	5.676,61
2.	Kab. Kutai Timur	19.955,72
3.	Kab. Kutai Kartanegara	8.683,05
VI	Pendampingan ISPO Kebun Sawit Rakyat	3.651,62
1.	Kab. Paser	1.038,10
2.	Kab. Penajam Paser Utara	189,20
3.	Kab. Kutai Timur	1.346,65
4.	Kab. Kutai Kartanegara	1.077,67
	TOTAL	144.444

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan gangguan usaha tanaman perkebunan yang dilakukan sebanyak 5 pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut antara lain:
 1. Koperasi Long Blea Sejahtera Kab. Kutai Timur dengan PT Karya Prima Agro Sejahtera (PT KPAS/ DSN Group) Kab. Kutai Timur;
 2. PT Subur Abadi Plantation Kab. Kutai Timur dengan pemilik ijin usaha pertambangan;
 3. KPPRI AROMA dengan PT Erabara Persada Nusantara Kab. Kutai Timur;
 4. Kelompok Tani Makmur II Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat Kab. Kutai Kartanegara oleh aktifitas pertambangan; dan
 5. PT Delta Utama Resources Kab. Kutai Barat dengan Koperasi Sawit Jempang Sukses Bersama Kab. Kutai Barat.

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.189.189.310,- atau 98,04% dari pagu sebesar Rp. 1.212.983.300,-. Indikator kinerja program ini yaitu persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan capaian 90,62% atau 164,76% dari target 55%. Capaian ini diperoleh dari seluas 1.160 Ha areal yang dikendalikan di bagi 1.280 Ha luas areal yang dilaporkan akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Luas Areal Perkebunan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Akibat Serangan OPT Tahun 2024

No.	Uraian	Komoditi	Luas yang Dikendalikan (Ha)	Lokasi
1	Penyakit layu Pucuk (<i>Fuserium, spp</i>)	Kelapa Sawit	0.5 Ha	Desa Sriraharja Kec. Babulu Kab. PPU
2	Kumbang Tanduk (<i>Orictes rhinoceros, L</i>)	Kelapa Kopyor	1.5 Ha	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
3	Tikus (<i>Rattus, spp</i>)	Kelapa Sawit	205.5 Ha	Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur
4	Rayap (<i>Coptatermes, spp</i>)	Kelapa Sawit	30 Ha	Kec. Paser Belengkong Kab. Paser
5	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	594 Ha	Desa Miau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur
6	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	27 Ha	Kec. Batu Engau Kab. Paser
7	Ulat Api (<i>Satothea, spp</i>)	Kelapa Sawit	270 Ha	Kec. Batu Engau Kab. Paser
8	Kumbang Tanduk (<i>Orictes rhinoceros, L</i>)	Kelapa	30 Ha	Kec. Teritip Kota Balikpapan
9	Busuk pangkal Batang (<i>Gonoderma boniniense</i>)	Kelapa Sawit	2 Ha	Kec. Babulu Laut kab. PPU
TOTAL			1,160 Ha	

Sumber: UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (2024)

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini terealisasi sebesar Rp. 1.215.328.968,- atau 98,15% dari pagu sebesar Rp. 1.238.209.041,-. Program ini memiliki indikator persentase perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 40,59% tercapai 41,22% atau 101,55%. Capaian ini diperoleh dari jumlah Perusahaan yang mendapat sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sampai dengan tahun 2024 yakni sejumlah 115 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan besar swasta di Kalimantan Timur yakni sejumlah 279 perusahaan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 35 perusahaan. Perusahaan yang telah mendapatkan

sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) pada tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2024

No	Kabupaten	Realisasi PUP	Kelas	Petugas
1.	Berau	1) PT. Buana Mudantara 2) PT. Hutan Hijau Mas 3) PT. Malindomas Perkebunan 4) PT. Satu Sembilan Delapan 5) PT. Anugerah Agung Prima Abadi 6) PT. Dwiwira Lestari Jaya 7) PT. Yudha Wahana Abadi 8) PT. Natura Pasific Nusantara 9) PT. Gunta Samba Jaya 10) PT. Berau Sawit Sejahtera 11) PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation (Talisayan Estate) 12) PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation (Biatan Estate) 13) PT. Inti Energi Kaltim 14) PT. Sentosa Kalimantan Jaya 15) PT. Global Primatama Mandiri	III II II II II II II II III II II II III II II	1. Syahrazat, ST 2. Purwo Hindarto, SP 3. Sovian Rody, SP 4. Endah Sariwulan, SP 5. Sunarto 6. Doni Manurung 7. Heni Risnawati, SP 8. Masyhadi 9. Marsin, S.Pt 10. Digdo Wahyudi, SP 11. Bayu Arminanda
2.	Kutai Timur	1. PT. Tridaya Hutan Lestari 2. PT. Bima Palma Nugraha 3. PT. Bima Agri Sawit 4. PT. Sabhantara Rawi Sentosa 5. PT. Sinergi Agro Industri 6. PT. Sinergi Agro Industri 7. PT. Indonesia Plantations 8. PT. Perkebunan Warga Rimba 9. PT. Kresna Duta Agroindo 10. PT. Tapian Nadenggan	III II II III II II II III II	1. Abd. Gani Sukkara, SP, MM 2. Mohammad Ali, SP 3. Deddy Eko Wahyudi, S.Hut 4. Haryanto, SP 5. RR Shanti (2022) 6. Ir. Aminuddin Aziz, MP 7. Syahriansyah, S.Hut, MM 8. Nina Indriani. SP 9. Joko Susanto, S.Hut 10. Septi Aisyiah, SP
3.	Kutai Kartanegara	1. PT. Maju Kalimantan Hadapan 2. PT. Sawit Prima Sakti 3. PT. Jaya Mandiri Sukses 4. PT. Cahaya Anugerah Platations 5. PT. Sawit Kaltim Lestari 6. PT. Agrieast Borneo Kencana 7. PT. Agrojaya Tirta Kencana (Opr)		1. Desy Noriyani, S.Hut, MP 2. M. Taufik Rahmani, SP, MP 3. M. Faisal, SP, MP 4. Darmi, SP, MP 5. Ardiansyah, S.PKP 6. Atika Wahyuni, SE
4.	Mahakam Ulu	1. PT. Permata Agro Sejahtera 2. PT. Putra Utama Lestari 3. PT. Borneo Bhakti Sejahtera	E III II	1. Agustina Inuq

Sumber: Bidang Usaha (2024)

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini terealisasi sebesar Rp. 9.350.459.368,- atau 97,34% dari pagu sebesar Rp. 9.606.208.785,-. Target indikator pada program ini yaitu:

1. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang meningkatkan kapasitasnya dengan capaian 13,48% atau 120,89% dari target 11,15%. Capaian ini diperoleh dari akumulasi jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 89 orang dibagi dengan target orang yang dilatih selama 3 tahun sebanyak 660 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Daftar Sumber Daya Manusia Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024

No.	Aktivitas	Jumlah SDM yang Ditingkatkan	Lokasi
1.	Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping, dengan tema”Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan Berbasis Korporasi”	20 Orang	Kab. Paser
2.	Pelatihan <i>Training Of Trainer</i> Bagi Petugas Kabupaten/Kota dengan tema “Pendampingan Penumbuhan Kebersamaan Kelembagaan Petani Dengan Sistem Kebersamaan Ekonomi dan Manajemen Kemitraaan (SKE-MK)”	20 Orang	
		2 Orang	Samarinda
		2 Orang	Kab. Kukar
		2 Orang	Kab. Kubar
		2 Orang	Kab. Kutim
		2 Orang	Kab. PPU
		8 Orang	Kab. Paser
3.	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Petugas Teknis Perkebunan” dengan tema “Budidaya Tanaman Kakao Berkelanjutan”	20 Orang	
		3 Orang	Samarinda
		3 Orang	Kab. Kukar
		5 Orang	Kab. Kubar
		4 Orang	Kab. Kutim
		5 Orang	Kab. Mahulu
4.	Peningkatan pengolahan dari kelapa menjadi minyak kelapa	10 Orang	Kab. Kukar
5.	Peningkatan SDM melalui Perolehan NIB dan PIRT dari Dinas Kesehatan	1 Orang	Kab. Kukar
6.	Pelatihan Peningkatan perubahan logo dan kemasan yang lebih menarik	5 Orang	
		2 Orang	Kab. PPU
		2 Orang	Samarinda
		1 Orang	Kab. Paser
7.	Pelatihan Perencanaan Bisnis Komoditi Perkebunan	9 Orang	
	a. Minuman rempah Instan	1 Orang	Kab. Kukar

No.	Aktivitas	Jumlah SDM yang Ditingkatkan	Lokasi
	b. Gula aren semut	1 Orang	Kab. Paser
	c. Jahe	1 Orang	Balikpapan
	d. Gula Semut	1 Orang	Samarinda
	e. <i>Cocopeat, cocofiber</i>	1 Orang	Samarinda
	f. Kelapa Jelly	2 Orang	Balikpapan
	g. Kopi bubuk dan kopi roasting	1 Orang	Kab. Kutim
	h. Gula semut	1 Orang	Kab. Kutim
8.	Pelatihan Business Matching Komoditas Hasil Pertanian	4 Orang	
	i. Gula kelapa	1 Orang	Kab. PPU
	j. <i>Cocopeat dan cocomesh</i>	1 Orang	Kab. PPU
	k. VCO	1 Orang	Kab. Paser
	l. Teh rosella dan bawang tiwai	1 Orang	Samarinda
	TOTAL	89 Orang	

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi serta Bidang Pengolahan dan Pemasaran (2024)

2. Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat dengan capaian 30,77% atau 116,11% dari target 26,50%. Capaian ini diperoleh dari akumulasi jumlah kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 36 lembaga dibagi dengan target kelembagaan petani selama 3 tahun sebanyak 117 lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
A.	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Petani Perkebunan		
1	Poktan Terbu Membangun	Wahyu	Desa Tebru Paser Damai Kec. Batu Engau Kab. Paser
2	Poktan Bersama	H. Abd. Raub	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
3	Poktan Masa Kini	Muhlis	Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kukar
4	Gapoktan Sumber Makmur	Pujar Aji Prasetyo	Desa Sungai Payang Loa Kulu Kab. Kukar
5	Poktan Kampung Kopi Luwak	Rindoni	Desa Prangat Baru Kec. Marangkayu Kab. Kukar
6	Poktan Karya Usaha	Hj. Asyah	Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
7	Poktan Pilar Jaya	Bana	Kelurahan Sepan Kec. Penajam Kab. PPU
8	Poktan Bukit Harapan	Akhmad Multazam	Kamp. Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
9	Poktan Jantur Lungau	Yanto	Kamp. Pepas Eheng Kec. Barong Tongkok
10	Poktan Tunas Muda	Pilipus Sardiansyah	Kamp. Sekoleq Joleg Kec. Sekolaq Darat
11	Poktan Poros Permai	Agus Salim	Kamp. Muyub Ulu Kec. Tering
12	Poktan Tipak Permai	Asmadi	Kamp. Muyub Ulu Kec. Tering
13	KWT. Kelumpang Bercahaya	Eli Yati	Kamp. Kelumpang Kec. Mook Manar Bulatn
14	Poktan Sumber Usaha	Kurdiman	Kamp. Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung
15	Poktan Karya Mandiri I	Bertolomeus Maidolin	Kamp. Linggang Amer Kec. Linggang Bigung
16	Poktan Jelewet Jaya	Indrawansyah	Kamp. Linggang Tutung Kec. Linggang Bigung
17	Poktan Karya Indah II	Anus	Kamp. Linggang Amer Kec. Linggang Bigung
18	Poktan Mentum Jaya	Willy F. Cerda	Kamp. Linggang Melapeh Baru Kec. Linggang Bigung
19	Poktan Sente'au	Yahya Wijaya Putra	Kamp. Kebut Kec. Linggang Bigung
20	Poktan Suka Abadi	Darmansyah	Kamp. Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung
B.	Pelatihan Sekolah Lapang Kelompok Tani		
21	Poktan Batu Lengiran	Basri	Desa Karang Dalam
C.	Pelatihan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan		
22	KUD Rangan Jaya	Teguh Asmaraas Hadi	Desa Padang Jaya Kec. Kuaro
23	KUD Tunas Murni	Armadi	Desa Kelempang Sari Kec. Kuaro
24	KUD Sumber Makmur	Suparjo	Desa Kendarom Kec. Kuaro
25	KUD Bumi Subur	Budiono	Desa Kertabumi Kec. Kuaro
26	KUD Jaya Mukti	Ajansyah	Desa Modang Kec. Kuaro
27	KUD Tani Subur	Suwardi	Desa Tani Subur Kec. Kuaro

No.	Lembaga	Pengurus	Alamat
28	Poktan Kandank Kayu	Dowik Suprawiyatna	Desa Kandank Kayu Kec. Kuaro
29	KUD Sumber Rejeki	Ngatimin	Desa Krayan Makmur Kec. Long Ikis
30	KUD Tani Makmur	Widodo	Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis
31	Koperasi Induk Paser Bumi Jaya Bersama Kab. Paser	Aliyadi	Kecamatan Long Ikis Kab. Paser
D.	1. Peningkatan SDM Petani tentang Pengolahan dan Pemasaran Kopi Luwak Prangat 2. Produk memperoleh sertifikasi Halal		
32	Kelompok Tani Kopi Luwak Prangat		Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara
E.	1. Terhubung dengan jejaring pasar melalui Business Matching 2. Terakses dengan pembiayaan melalui LPEI		
33	Koperasi Produsen Kriya Inovasi Mandara (KIM Nusantara)		Penajam Paser Utara
F.	Terakses pasar melalui Bunex 2024		
34	Bumdes Bawaq Na Lung Anai (Poktan Udip Tiga)		Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
G.	Terakses pasar dengan PT Multi Kusuama Cemerlang		
35	UPPB setia kawan		Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam kab. PPU
H.	Peningkatan Kelembagaan melalui Perolehan PIRT dan Sertikasi Indikasi Geografis		
36	MPIG Gula Aren		Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan kab. Kutai Kartanegara

Sumber: Bidang Pengembangan Komoditi serta Bidang Pengolahan dan Pemasaran (2024)

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Pertanian									
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,83		78,93	95,77	Indeks 121,34	85	181	199
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100	% 100,00	100	200	200
3.27.001.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)</i>	100		100,00	100	%	100	200	200
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10 Dokumen	4	4	Dokumen 100,00	3	17	155
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		2	2	Dokumen 100,00	2	4	67
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6		2	2	Dokumen 100,00	2	4	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9		3	3	Dokumen 100,00	3	6	67
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	4 Laporan	6	6	Laporan 100,00	6	16	89
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100		100	100	% 100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	81 Orang/ Bulan	86	84	Orang/ Bulan 97,67	138	303	158
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	1 Dokumen	1	1	Dokumen 100,00	1	3	100
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	45		1	1	Dokumen 100,00	15	16	36
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	9		3	3	Dokumen 100,00	1	4	44
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	36		12	12	Laporan 100,00	12	24	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	36		12	12	Dokumen 100,00	12	24	67
3.27.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)</i>	75		75	20	% 26,67	75	95	127
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	18		2	3	Dokumen 150,00	2	5	28
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	18		1	1	Dokumen 100,00	2	3	17
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		4	4	Laporan 100,00	4	8	67
3.27.01.1.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi perkebunan (%)</i>	100		100	109,33	% 109,33	100	209	209
3.27. 01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	3		1	1	Laporan 100,00	1	2	67
3.27.001.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	83,33		35,71	92,86	% 260,04	59,52	152	183
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		1	1	Paket 100,00	1	2	67
3.27. 01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		1	1	Paket 100,00	1	2	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		1	1	Dokumen 100,00	1	2	67
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	53	149	Orang 72	78	Orang 108,33	15	242	457
3.27.001.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu</i>		5	Unit 4	4	Unit 100,00	4	13	-
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	Paket 4	4	Paket 100,00	1	9	75
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	4	Paket 4	5	Paket 125,00	4	13	108
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4	Paket 4	4	Paket 100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	-	Paket 4	4	Paket 100,00	4	8	67
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	12	Dokumen 12	12	Dokumen 100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	3	1	Laporan 1	1	Laporan 100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	39	13 Jenis	13	13 Jenis	100,00	7	33	85
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	10	10 Unit	1	1 Unit	100,00		11	110
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	9		1	1 Unit	100,00	1	2	22
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	184	58 Unit	79	188 Unit	237,97	21	267	145
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	3 Jenis	4	4 Jenis	100,00	4	11	275
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	90		90	90 %	100,00	90	180	200
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	67	36 Unit	21	21 Unit	100,00	23	80	119
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2 Unit	1	1 Unit	100,00	1	4	133
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	60	21 Unit	20	20 Unit	100,00	69	110	183
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,46		25,36	25,00 %	98,58	25,41	50	198
		<i>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)</i>	10		9	9 Jenis	100,00	10	19	190
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	149.702	- ha	50.702	62.772	Ha	123,81	49.000	111.772	75
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2		2	2	Jenis	100,00	2	4	200
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3	1 Dokumen	1	1	Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	3	-	1	1	Dokumen	100,00	1	2	67
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100		100	100,31	%	100,31	100	200	200
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	250	176 Pelaku Usaha	200	224	Pelaku Usaha	112,00	225	625	250
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	126.000	21.248 Ha	144.000	144.444,43	Ha	100,31	124.000	289.692	230
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	2.175	430 Ha	500	980	Ha	196,00	725	2.135	98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	70,30		40,59	41,22	PUP	101,55	55,45	97	138
3.27.006.1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>	225	<i>Perusahaan</i> 107	75	75	<i>Perusahaan</i>	100,00	75	257	114
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	6	Laporan 1	2	2	Laporan	100,00	2	5	83
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan (%)	79,49		26,50	30,77	%	116,11	52,99	84	105
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	34,55		11,15	13,48	%	120,90	23,03	37	106
		<i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	7		3	3	<i>Kegiatan</i>	100,00	2	5	71
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)	140		65	65	orang	100,00	40	105	75
		<i>Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)</i>	1.248		476	476	<i>Orang</i>	100,00	416	892	71
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3	Dokumen 1	1	1	Dokumen	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	63	10 Kelompok	21	21 Kelompok	100,00	21	52	83
		<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	54	-	1	1 Lembaga	100,00	18	19	35
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1 unit	1	1 Unit	100,00	1	3	300
3.27.007.1.03.006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1	1 Unit	1	1 Unit	100,00	1	3	300
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	87,20		85,87	98,10 Indeks	114,24	86,20	184	211
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100 %	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	100		100	100 %	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100		100	148,91 %	148,91	100	249	249
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1		1	1 Laporan	100,00	1	2	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	66	77 %	59	100 %	169,49	62	239	362
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30		13	15 Orang	115,38	11	26	87
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1 Unit	100,00	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12 Dokumen	12	12 Dokumen	100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6	6 Jenis	2	2 Jenis	100,00	2	10	167

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	25 Unit	10	10 Unit	100,00	8	43	478
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4	3 Jenis	4	4 Jenis	100,00	4	11	275
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50		55	68,75 %	125,00	50	119	238
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	2 Unit	2	1 Unit	50,00	2	5	83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5 Unit	4	4 Unit	100,00	4	13	108
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39	59 Unit	13	40 Unit	307,69	13	112	287
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	18.000.000		6.000.000	12.460.941 benih	207,68	6.000.000	18.460.941	103
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	15.000.000		5.000.000	12.435.941 benih	248,72	5.000.000	17.435.941	116
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	450	298 Sertifikat	150	499 Sertifikat	332,67	200	997	222
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,38		79	97,80 Indeks	123,80	83,75	182	205
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100 %	100,00	100	200	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	92		100	100	%	100,00	100	200	217
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1 Dokumen	1	1	Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100		100	100	%	100,00	100	200	200
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3		1	1	Laporan	100,00	1	2	67
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70,50		35	35	%	100,00	53	88	125
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	8 Orang	6	6	Orang	100,00	11	25	139
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1	Unit	100,00	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4	Paket	100,00	4	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100,00	4	12	100
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12 Dokumen	12	12 Dokumen	100,00	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i>	26	5 Jenis	14	14 Jenis	100,00	3	22	85
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	5		17	17 Unit	100,00	1	18	360
3.27.001.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i>	38	3 Jenis	4	4 Jenis	100,00	4	11	29
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	4	6	200
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	3	100
		<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	75		65	65 %	100,00	70	135	180
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	1 Unit	1	1 Unit	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1 Unit	1	1 Unit	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	8 Unit	10	10 Unit	100,00	29	47	157
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	65	-	55	90,62 %	164,76	60	151	232
		<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)</i>	84		26	26 Pelaku Usaha	100,00	28	54	64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.360	547 Ha	1.040	1.160 Ha	112	1.120	2.827	84
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,50		80	97,40 %	121,75	82,75	180	211
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	100 %	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100		100	100 %	100,00	100	200	200
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1 Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	3	100
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100		100	100,01 %	100,01	100	200	200
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	3		1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	60		40	100 %	250,00	50	150	250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	7 Orang	8	8 Orang	100	7	22	105
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	1	1 Unit	100	1	5	500
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100	4	12	100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2 Paket	4	4 Paket	100	4	10	83
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4 Paket	4	4 Paket	100	4	12	100
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	2 Paket	4	4 Paket	100	4	10	83
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12 Dokumen	12	12 Dokumen	100	12	36	100
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1 Laporan	1	1 Laporan	100	1	3	100
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	15	2 Jenis	4	4 Jenis	100	6	12	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		7	7	Unit	100,00	1	8	400
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10	10	Unit	100,00	14	24	480
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	8	3	Jenis	4	4	Jenis	4	11	138
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1	Laporan	1	1	Laporan	1	3	100
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	Laporan	1	1	Laporan	1	3	100
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	Laporan	1	1	Laporan	1	3	100
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1	Laporan	1	1	Laporan	1	3	100
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70		60	60,37	%	100,62	65	125	179
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	2	Unit	2	2	Unit	2	6	120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	1 Unit	3	3 Unit	100	1	5	56
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	13 Unit	5	5 Unit	100	3	21	233
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	98	88,00 %	95	95,01 %	100	96,50	280	285
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	150.000	50.000 Benih	50.000	50.000 Benih	100	50.000	150.000	100
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	6	1 Laporan	1	1 Laporan	100,00	2	4	67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2024 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C30. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	22.303.000	19.829.215	88,91	Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (2024)
2	NTP perkebunan rakyat	Persentase	135	186,89	138,44	Sumber: Dirjenbun Kementan RI
3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (<i>Sustainable Palm Oil</i>)	Pelaku Usaha	100	134	134	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2024)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	89	90,01	101,13	Sumber: Laporan IKM Disbun 2024
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	77,50	78,10	100,77	LHE SAKIP Disbun Tahun 2023

Pada tahun 2024, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan Tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan periode Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini 4 (empat) tahun ke depan sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya target pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta Ha peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2.3 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,6 juta Ha, termasuk 1,4 juta Ha kelapa sawit. Masih terdapat 957.500 Ha areal lahan yang belum dimanfaatkan.

Permasalahan pembangunan perkebunan mencerminkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan perkebunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Kalimantan Timur belum memiliki peta permasalahan di sektor perkebunan yang dipetakan secara spasial, kuantitatif dan sesuai dengan urgensinya. Permasalahan yang teridentifikasi hanya bersifat kuantitatif dan tidak terpetakan. Misalnya, sulit untuk mendapatkan data spasial dan akurat terkait kebutuhan peremajaan masing-masing komoditas perkebunan. Demikian juga dengan data-data lain, seperti yang terkait dengan praktik pemupukan dan kebutuhan pupuk, hama dan penyakit tanaman, penurunan produktifitas dan mutu produk, pemasaran hasil, kelembagaan, kebutuhan infrastruktur dan berbagai hal lain. Karena

permasalahan belum terpetakan dengan baik, sulit untuk membuat perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang tepat, sesuai kebutuhan berdimensi spasial dan waktu serta terintegrasi dengan sektor sektor lain.

Walaupun belum berbasis spasial, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dan mencapai tujuan dan sasaran dinas serta berkontribusi pada pencapaian target RPJMD telah dilakukan. Hasil identifikasinya sebagai berikut:

Tabel 2.10 Permasalahan Perkebunan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sub sektor perkebunan belum optimal dalam mendorong peran strategisnya sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Produksi Komoditas Perkebunan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penggunaan benih yang unggul dan bermutu 2. Kurang tersedianya prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman 3. Masih rendahnya pengawasan peredaran sarana, prasarana dan alsintan 4. Masih tingginya tingkat serangan OPT dan gangguan usaha lainnya 5. Masih rendahnya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan 6. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan 7. Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan 8. Terbatasnya luas peruntukan dalam RTRW untuk pengembangan sub sektor perkebunan 9. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan provinsi
		Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 2. Keterbatasan modal dan kredit untuk pengembangan hilirisasi pengolahan hasil perkebunan 3. Sebaran prasarana dan sarana pascapanen yang belum merata

			<p>dan tidak sesuai kebutuhan spesifik komoditas di Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none">4. Rendahnya adopsi teknologi serta inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekebun tentang manfaat kemitraan dalam akses pasar6. Rendahnya evaluasi berkala terhadap efektifitas sarana dan prasarana yang telah di bangun7. Lemahnya rantai pasok dan hilirisasi produk8. Rendahnya mutu hasil produk perkebunan9. Belum tersedianya regulasi tentang standarisasi harga komoditas perkebunan selain Kelapa Sawit10. Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif11. Masih rendahnya pengawasan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS)12. Masih adanya pabrik kelapa sawit tanpa kebun13. Rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha perkebunan14. Kurang tersedianya petugas penyuluh lapangan khusus perkebunan15. Belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan pekebun yang ada
--	--	--	---

		<p>Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan2. Masih terbatasnya pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk pengembangan bioenergi3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan cadangan karbon rendah untuk pembangunan perkebunan4. Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara optimal dan konsisten5. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tentang penerapan kewajiban pemenuhan bahan baku Sawit 20%6. Kurangnya bahan baku yang berasal dari aneka palma lainnya sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT)7. Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah8. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun9. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan energi baru terbarukan dari sub sektor perkebunan10. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> 11. Masih rendahnya partisipasi dan fasilitasi penerbitan STDB 12. Masih adanya gangguan usaha dan Konflik perkebunan
		Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel 2. Kurangnya kesadaran dalam peningkatan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel 3. Kurangnya kuantitas SDM yang handal 4. Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai 5. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 7. Kurangnya komitmen aparatur dalam menerapkan zona integritas 8. Belum optimalnya pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 9. Belum optimalnya pengelolaan aset

Semua tanaman perkebunan, termasuk kebun plasma sawit, tidak diusahakan dengan optimalisasi nilai tambah. Selama puluhan tahun, semua komoditas perkebunan hanya diusahakan tanpa usaha untuk mendapatkan nilai tambah, baik selama proses produksi di on farm (kebun) maupun di pasca panen, pemasaran dan pengolahan (processing). Ini artinya, petani tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahatani dan bisnis perkebunan mereka. Petani sejak dulu hanya mengandalkan penjualan bahan baku asalan dari hasil panen mereka. Nilai

tambah dapat diperoleh, misalnya melalui integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, penghematan (optimalisasi dan efisiensi) penggunaan saprodi, penanganan pasca panen, sistem penjualan dan pengolahan hasil. Dalam banyak hal, petani sendiri tidak banyak bisa berbuat untuk mendapatkan nilai tambah ini, karena (misalnya) keterbatasan pengetahuan, modal dan akses pasar yang tepat bila produk yang dihasilkan telah mendapatkan nilai tambah.

Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan juga menjadi permasalahan pada fungsi pelayanan Dinas Perkebunan. Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) dan Badan Energi Internasional (*International Energy Agency/IEA*), mendefinisikan pertanian energi sebagai pendekatan yang memanfaatkan sumber daya pertanian, seperti biomassa, bioenergi, dan teknologi energi terbarukan, untuk menghasilkan energi berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Melalui produksi biofuel, biogas, dan biomassa, pertanian energi tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan diversifikasi pendapatan bagi petani. Pertanian energi berbasis biomassa semakin menjadi topik sentral dalam pengembangan energi berkelanjutan di banyak negara kawasan Asia Pasifik. Sebagai bagian dari energi baru terbarukan (EBT), biomassa pertanian dipandang tidak hanya sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga sebagai strategi mitigasi perubahan iklim yang mampu mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif.

Konsep ini berbasis pada ekonomi sirkular, di mana limbah pertanian, industri, dan perkotaan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Banyak contoh inovatif di kawasan ini yang semakin menegaskan potensi biomassa sebagai pilar penting dalam transisi energi. Di Vietnam, sekam padi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar alternatif yang ekonomis. Di Filipina, limbah jagung dikelola untuk menghasilkan bioetanol dan biogas yang mendukung kebutuhan energi lokal. Sementara itu, di Indonesia tanaman indigofera dimanfaatkan untuk produksi bioenergi dan pakan ternak, menciptakan nilai tambah dari sektor pertanian.

Pengembangan energi biomassa membantu pengurangan emisi karbon sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas pedesaan. Di Indonesia, pembangkit energi milik perusahaan listrik negara mengembangkan

ekosistem biomassa sebagai bahan baku alternatif pengganti batu bara melalui program *co-firing* di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai target *net zero emissions* (NZE) pada tahun 2060 mendatang dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai mitra pengelola biomassa. Dukungan kebijakan strategis, pembiayaan berbasis karbon, dan kolaborasi lintas batas menjadi kunci percepatan pengembangan energi biomassa. Partisipasi petani, koperasi, dan sektor swasta sangat penting agar manfaat energi biomassa dapat dirasakan secara luas. Secara keseluruhan, pengembangan energi biomassa memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Sumber daya biomassa yang melimpah, dukungan regulasi yang memadai, serta peluang dari pasar kredit karbon menjadikan biomassa solusi strategis dalam menghadapi krisis energi dan lingkungan. Meskipun ada tantangan, seperti pengelolaan rantai pasok dan biaya teknologi, masa depan biomassa tetap cerah dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem pasar karbon.

Disamping permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pelayanan publik juga merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang

adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan perkebunan dan hasil penelaahan kebijakan nasional hingga daerah, sebelum menentukan isu-isu strategis, berikut ini akan dirangkum hasil identifikasi isu-isu menurut dinamika global, nasional dan regional.

Tabel 2.11 Identifikasi Isu-Isu Menurut Dinamika Global, Nasional Dan Regional

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD		
			Global	Nasional	Regional
<p>1. Melimpahnya komoditas unggulan sektor pertanian: Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada, aren, kelapa dalam, kopi);</p> <p>2. Melimpahnya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas, kelapa sawit, serta mineral logal yang menjadi basis utama pengembangan hilirisasi industri pengolahan energi, petrokimia, smelter, bioenergi, dan CPO berbasis green industry</p> <p>3. Ketersediaan lahan dan produksi dari sektor pertanian (dalam arti luas) membuka peluang untuk diversifikasi industri berbasis agro-maritim</p>	<p>1. Produksi komoditas perkebunan belum optimal</p> <p>2. Rendahnya nilai tambah produk perkebunan</p> <p>3. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan</p> <p>4. Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal</p>	<p>1. Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan</p> <p>2. Industri, inovasi, dan infrastruktur</p>	<p>1. Ketahanan Pangan</p> <p>2. Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia</p>	<p>1. Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2. Ketahanan Ekonomi</p>	<p>1. Ketahanan Pangan</p> <p>2. Diversifikasi ekonomi</p> <p>3. Pengembangan Industri</p>

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, meliputi :

1. Peningkatan produksi komoditas perkebunan
2. Pemenuhan pangan yang berbahan baku dari komoditas perkebunan untuk IKN
3. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perkebunan
4. Peningkatan kualitas hasil pasca panen, pengolahan dan perluasan akses pasar
5. Peningkatan kemitraan pekebun
6. Penurunan emisi GRK dalam pembangunan perkebunan
7. Terbatasnya akses pasar bagi produk yang tidak memenuhi standar keberlanjutan
8. Pemenuhan bahan baku untuk bioenergi dari sub sektor perkebunan
9. Penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2025.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS+3 UPTD					77.964.423.000	DINAS+3 UPTD				52.745.820.000	
DINAS PERKEBUNAN					67.226.246.372	Dinas Perkebunan				40.921.988.094	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	95,09	41.094.674.997	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	95,09	32.462.512.891	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	7.397.701.748	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	878.222.058	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	708.347.626	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	362.240.410	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	66.714.387	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisien dalam pelaksanaan kegiatan maka sub kegiatan dihilangkan digabung dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.207.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisien dalam pelaksanaan kegiatan maka sub kegiatan dihilangkan digabung dengan sub kegiatan penyusunan dokumen

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											perencanaan perangkat daerah
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	702.769.576	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5.913.662.559	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	246.966.744	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	269.014.904	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.337.720.638	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.255.327.949	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.665.713.412	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.665.713.412	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	480.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	457.320.000	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	128.325.058	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	89.902.031	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	11.499.068	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	28.370.422	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	42.392.506	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	22.852.678	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	173.189.610	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	63.546.854	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	17.856.904	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	6	145.194.839	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	10.137.867	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	63.546.854	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	9.061.839	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	17.704.978	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	9.061.839	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	17.704.978	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33	1.021.740.328	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33	131.582.560	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	487.815.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	38.564.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	85.182.560	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	24.591.328	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	-	Untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan di hilangkan dan digabung kedalam sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	23	470.770.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	23	46.400.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	1.985.520.209	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	1.098.217.668	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	55.009.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	45.943.222	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	330.483.227	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	160.138.951	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	362.054.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	222.060.000	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	84.503.152	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	90.225.495	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	11.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.141.950.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	579.850.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	252.939.835	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	14.126.156	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	220.020.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran pengadaan pakaian dinas tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	32.919.835	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	14.126.156	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	2.336.499.190	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	2.448.298.548	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	36.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	20.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	594.267.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	631.317.648	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	143.471.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	11.300.900	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.562.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.785.680.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	580.301.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	555.486.120	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	23	315.173.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	15	333.434.120	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	176.418.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	133.342.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas Perkebunan	20.004.096,00	15.622.350.076	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas perkebunan (Ton)	20.004.096,00	3.686.927.115	
								Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)	13,33%		
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	15.622.350.076	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	3.686.927.115	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	15.622.350.076	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	3.632.479.289	
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	1	27.223.913	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	1	27.223.913	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	44525	1.243.654.780	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	44525	996.382.221	
								Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	0,12		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	1.243.654.780	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan (Jenis)	1	996.382.221	
								Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Kelompok Tani)	2		
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1.056.751.280	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	756.997.461	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	186.903.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	143.003.595	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	27.235.694	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	2	69.145.471	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Perkebunan) (%)	100	4.906.646.362	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	100	1.509.943.943	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	250	4.906.646.362	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	94	1.509.943.943	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	126000	2.012.128.758	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	95000	856.999.890	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.894.517.604	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	700	652.944.053	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi	33,05	1.358.499.284	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	33,05	717.847.091	
			Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	19,62				Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	19,62		
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.358.499.284	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	35	717.847.091	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.358.499.284	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan (Pelaku usaha)	7	717.847.091	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	25,39	3.000.420.873	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	36,17	1.548.374.833	
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	36,17				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kapasitasnya Meningkat (%)	25,39		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	542.933.827	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	-	
3.27.07.1.01.0004	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang)	40	542.933.827	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	-	Efisiensi anggaran maka sub kegiatan tidak dianggarkan dan penyuluh tahun 2026 kewenangan berpindah ke pusat
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	1.610.046.353	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (orang)	130	1.438.418.092	
								Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)	19		
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	878.171.171	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Luar Prov Kaltim	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1.238.428.496	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	731.875.182	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	10	199.989.596	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	847.440.693	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	1	109.956.741	
3.27.07.1.03.0005	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	551.405.542	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	0	-	Sub Kegiatan di hilangkan karena pada tahun 2025 korporasi telah terbentuk
3.27.07.1.03.0006	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1	296.035.151	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	109.956.741	
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.518.500.320	UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.329.277.174
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	87,2	1.590.710.983	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	95	1.405.796.283	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	74.640.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	74.640.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	2.571.220	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100	14.953.576	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.571.220	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	14.953.576	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66	174.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66	150.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10	174.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10	150.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	336.189.630	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	255.099.248	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.013.418	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.010.274	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	75.008.391	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	57.774.633	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	69.262.961	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	69.212.244	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	13.348.060	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	11.802.097	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	1.980.000	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	166.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	110.320.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2	8.548.383	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	0	-	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8.548.383	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4	870.125.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1	794.141.459	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.830.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	150.095.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	145.421.459	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	715.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	642.720.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50	114.316.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2	116.962.000	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	27.052.000	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	50.000.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	39.910.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	60	39.910.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	8000000	927.789.337	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	200	923.480.891	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5000000	927.789.337	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	1	812.922.441	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	487.558.052	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	10 Kab/ Kota di Kaltim, Kalimantan Utara	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	200	458.832.623	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	440.231.285	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	354.089.818	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)	2	110.558.450	
						Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	110.558.450	Penyesuaian dengan adanya Kepmendagri no 900.1-2850 Tahun 2025
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					2.833.857.613	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					6.250.552.220
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	88,38	1.702.158.966	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	82,75	1.750.552.220	
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	96.240.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	96.240.000	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	1.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	100	1.113.500	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.113.500	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	70,5	78.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	30	45.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	78.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	45.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	372.151.068	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	297.354.708	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	9.080.076	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	11.028.783	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	51.150.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	83.438.639	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	36.473.270	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	40.177.936	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	22.064.608	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	25.101.350	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.878.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.960.000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	249.504.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	133.648.000	
3.2701.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	5	98.598.498	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	2	43.001.852	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	2	60.099.074	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	38.499.424	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	43.001.852	
3.27.01.1.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	4	963.127.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	877.223.400	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	242.727.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	227.383.400	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	715.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	644.640.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	75	104.322.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman (P2TP))	1	390.618.760	

Kode	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	24.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	17.036.000	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	341.541.760	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	29.972.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	32.041.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90	1.131.698.647	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	67	4.500.000.000	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	30	1.131.698.647	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	4		
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1200	1.131.698.647	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	2840	4.500.000.000	
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					5.385.818.695	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					3.244.002.512
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	85,5	1.954.474.155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	79,9	1.601.773.797	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	84.960.000	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	49.927.158	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100	17.400.000	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	49.927.158	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	17.400.000	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	60	112.970.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	38	90.000.000	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	112.970.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6]	90.000.000	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1	345.430.657	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1	311.240.517	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.970.348	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.168.774	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	89.812.341	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	112.375.166	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	35.880.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	42.180.000	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	33.836.768	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	19.136.577	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.939.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.980.000	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	175.992.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kalim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	128.400.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6	339.575.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	0	-	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	291.436.400	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	48.139.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	Efisiensi anggaran tidak dianggarkan
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4	897.698.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	3	883.866.200	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.630.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	148.468.800	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	156.586.200	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	744.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	722.280.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	70	123.912.140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	70	214.307.080	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	44.662.140	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	46.967.080	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	120.000.000	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	29.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	47.340.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	98	3.431.344.540	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	3,32	1.642.228.715	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50000	3.431.344.540	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu (Benih)	1100000	1.642.228.715	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	3.431.344.540	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	20000	1.642.228.715	

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan penyesuaian :

1. Terdapat beberapa Sub kegiatan yang dihilangkan guna efisien dan efektifnya pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya sub kegiatan baru hasil dari penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Adanya efisiensi anggaran yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihilangkan/tidak dianggarkan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, program dan kegiatan yang dirumuskan juga mempertimbangkan berbagai usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi atau dihimpun melalui pengumpulan informasi di lapangan, termasuk hasil pengamatan serta pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

Lebih lanjut, pada tahun 2026, subsektor Perkebunan melaksanakan kegiatan utama yang bersifat operasional dan langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat Perkebunan. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan yang mendukung Program Unggulan Jospol 1 Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, serta kegiatan prioritas yang menjadi major project Dinas Perkebunan. Kegiatan prioritas tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Komoditi Kakao, Kopi dan Aren di Kabupaten Kutai Karta

2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH)
3. Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Komoditas Perkebunan
4. Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih serta Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat dan Berlabel

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (sebagaimana terlampir).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

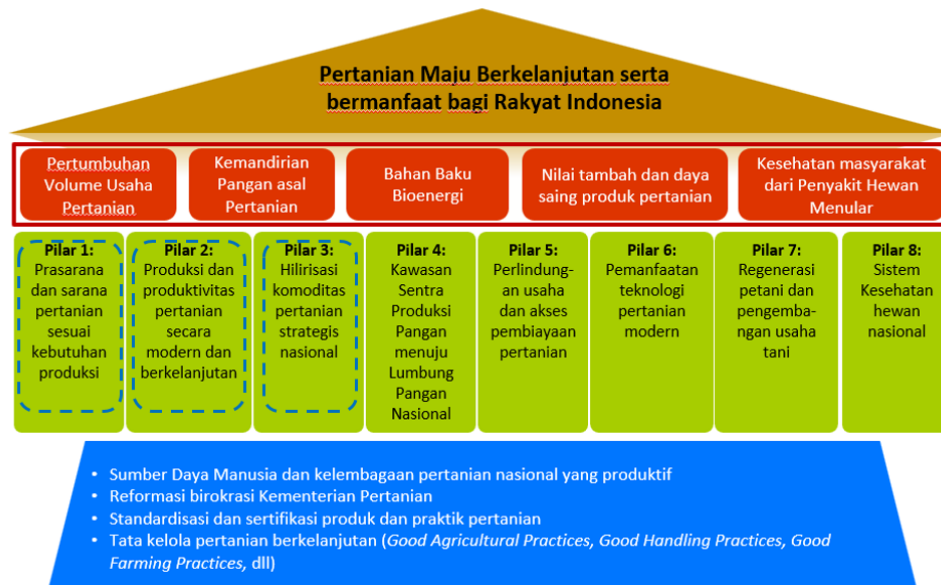
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dicapai dengan Program Prioritas Nasional (terkait pertanian) yakni:

- a. PN 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dengan Program Prioritas **Swasembada Pangan** melalui :
 - Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah, dengan indikator : Produksi tanaman vanili, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, karet, kakao, the serta pertumbuhan PDB tanaman perkebunan
 - Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dengan indikator persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
- b. PN 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan Program Prioritas **Pengembangan Hilirisasi** Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor melalui :
 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa
 - Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong

Terkait Program Nasional di atas maka kerangka strategis atau rumah strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

KERANGKA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN



Gambar 3.1 Rumah Strategis Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian adalah Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“**Pertanian**” bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. (Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan)

“**Maju**” bermakna bahwa Pertanian Indonesia mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian: Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

“**Berkelanjutan**” bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan). □ “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

“**Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**” bermakna bahwa (1) komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian; (2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan

kesejahteraan petani; (3) komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat; dan (4) Kesehatan rakyat dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Visi Kementerian Pertanian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan petani

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian.

2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Misi 2 ini mencakup seluruh rantai nilai pertanian : Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

Misi 2 ini juga mendorong penerapan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan: pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Bab I, Pasal 1, Angka 1, UU nomor 22 tahun 2019)

3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT); dan

Misi 3 ini mendorong optimasi manfaat pertanian bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia

4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan serta dampak penyakit hewan kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Misi 4 ini menjadi misi khusus dikarenakan otoritas veteriner di Indonesia hanya berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Otoritas veteriner dibutuhkan sebagai Pembina seluruh SDM veteriner di Indonesia. Pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit hewan merupakan bagian yang terpisah dari pengelolaan pangan asal ternak.

5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi kementerian pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. RB Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Visi Misi diatas dapat dicapai dengan melaksanakan delapan pilar strategis. Berikut delapan pilar strategis tersebut:

- Pilar 1 :
Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai kebutuhan produksi
- Pilar 2 :
Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan
- Pilar 3 :
Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional
- Pilar 4 :
Kawasan sentra produksi pangan menuju lumbung pangan nasional
- Pilar 5 :
Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian
- Pilar 6 :
Pemanfaatan teknologi pertanian modern
- Pilar 7 :
Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani
- Pilar 8 :
Sistem kesehatan hewan nasional

Berdasarkan rumah strategis tersebut maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

1. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
2. Meningkatnya pendapatan petani
3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian
4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
5. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja sasaran Program Ditjen Perkebunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun	IKP 1	Indeks harga yang diterima pekebun
SP 2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produksi dalam negeri	IKP 2	Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri
SP 3	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan	IKP 3	Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan
SP 4	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan yang siap digunakan	IKP 4	Rata rata volume ekspor komoditas perkebunan
SP 5	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 5	Indeks hilirisasi komoditas perkebunan unggulan
SP 6	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	IKP 6	Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi
SP 7	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029 adalah :

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Perkebunan.

Indikator :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)
- Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai tiga tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2025 - 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Pekebun sub Sektor Perkebunan

Indikator :

- Rata-rata produktitas komoditas unggulan perkebunan (Kg/Ha)
- NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)

2. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan

Indikator :

- Jumlah Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (ton CO₂ eq)

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (nilai)
- Indeks Pelayanan Publik (indeks)

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2026
Sasaran 1 Akselerasi Perekonomian Daerah	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Perkebunan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)	1,81
		1. Meningkatnya Daya Saing dan Kesejahteraan Pekebun sub Sektor Perkebunan	1. Rata-rata produktitas komoditas unggulan perkebunan (Kg/Ha)	3.031
			2. NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)	192.88
Sasaran 4 Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)	4,38
		2. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan	Jumlah Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (Ton CO2 eq)	16.121.500
Sasaran 9 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/predikat)	80,25/A
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (indeks)	90,25
Sasaran 10 Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 3 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian; Dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

3.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada RKPD 2026, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - b) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Administasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan; dan
 - c) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih;
 - b) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - c) Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
 - a) Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - b) Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; dan
 - c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
 - d) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:

- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
- c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pendampingan dan pengawalan korporasi petani; dan

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2026 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 52.745.820.000,-** (*Lima puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp. 40.921.987.386,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.329.277.388,- UPTD P2TP sebesar Rp. 6.250.552.526,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 3.244.002.700,- . Adapun rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
DINAS+3 UPTD				52.745.820.000			50.700.693.000
DINAS PERKEBUNAN				40.921.988.094			39.839.542.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		95,09	30.701.676.675	1.1.01 Pajak Daerah	95,21	29.809.729.182
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	1.760.836.216		100	1.891.613.818
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)</i>		<i>100</i>	<i>878.222.058</i>		<i>100</i>	<i>762.477.100</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Samarinda, Luar Provinsi	7	362.240.410		7	340.303.504
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	6	246.966.744		6	218.232.744
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	269.014.904		1	203.940.852
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>		<i>100</i>	<i>27.255.327.949</i>		<i>100</i>	<i>27.184.848.765</i>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Samarinda	137	26.665.713.412		139	26.597.852.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	457.320.000		1	465.600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	89.902.031		1	88.950.310
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	12	42.392.506		12	32.446.455
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)</i>		30	63.546.854		30	46.196.570
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Samarinda, Balikpapan, Paser dan Kukar	4	63.546.854		6	46.196.570
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi perkebunan (%)</i>		100	17.704.978		1	9.269.635
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim	1	17.704.978		1	9.269.635
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>		100,00	131.582.560		100,00	125.358.560

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim	1	85.182.560		1	49.058.560
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	23	46.400.000		23	76.300.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)</i>		4	1.098.217.668		4	1.268.295.270
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	1	45.943.222		1	45.943.222
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	160.138.951		4	90.459.801
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	222.060.000		4	242.330.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	90.225.495		4	83.339.784
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	579.850.000		1	806.222.463
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>		1	14.126.156			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	2	14.126.156		-	-
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>		4	2.448.298.548		4	1.994.938.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	20.000.000		1	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	631.317.648		1	592.017.648
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Dalam Daerah Lingkup Prov. Kaltim dan Luar Provinsi Kaltim	1	11.300.900		1	11.300.900
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	1.785.680.000		1	1.371.620.152
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>		61,73	555.486.120		64,29	309.958.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Samarinda	15	333.434.120		23	208.906.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	133.342.000		1	60.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	69	88.710.000		69	40.552.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas perkebunan (Ton)		20.004.096,00	3.686.927.115	1.2.01.07Dana bagi Hasil (DBH)	20.092.114,00	4.026.566.366
	Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)		13,33%			15,00%	
<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)</i>		5	3.686.927.115		6	4.026.566.366
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	3.632.479.289		1	3.972.118.466
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.223.913		1	27.223.950
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.223.913		1	27.223.950

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)		44.525	996.382.221	1.1.01 Pajak Daerah	40.450	426.381.548
	Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)		12%			16%	
<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan (Jenis)</i>	<i>Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau</i>	<i>1</i>	<i>996.382.221</i>		<i>1</i>	<i>426.381.548</i>
	<i>Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Kelompok Tani)</i>		<i>2</i>			<i>4</i>	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	756.997.461		0	-
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Bontang, Berau	1	143.003.595		1	157.302.745
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	27.235.694		2	27.235.731

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar,Berau,Paser	2	69.145.471		2	69.145.589
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)		100,00	1.509.943.943	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	100,00	1.311.677.615
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i>	<i>7 Kabupaten (Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, PPU dan Paser)</i>	<i>94</i>	<i>1.509.943.943</i>		<i>94</i>	<i>1.311.677.615</i>
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, Mahakam Ulu, Samarinda	95.000	856.999.890		95.000	745.087.315
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	7 Kabupaten (Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, PPU dan Paser)	700	652.944.053		700	566.590.300
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi (%)		33,05	717.847.091	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	49,64	623.722.985
	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)		19,62			20,58	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>		35	717.847.091			
	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan (Pelaku usaha)</i>		7	-		35	623.722.985
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)		3	717.847.091		1	149.260.385
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)		36,17	1.238.428.496	1.1.01 Pajak Daerah 1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	55,45	1.082.334.685
	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		25,39	309.946.337		47,76	667.516.601
<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (orang)</i>	<i>Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Luar Prov Kaltim</i>	130	1.438.418.092		280	1.682.499.691
	<i>Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)</i>		19			21	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Paser, Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Luar Prov Kaltim	1	1.238.428.496		1	1.082.334.685

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan	10	199.989.596		16	600.165.006
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	<i>Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser</i>	<i>1</i>	<i>109.956.741</i>		<i>1</i>	<i>67.351.595</i>
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	Balikpapan, Kutim, Kukar, PPU, Samarinda, Kubar, Berau, Paser	1	109.956.741		1	67.351.595
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)				2.329.277.174			2.122.945.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	Samarinda	95,00	999.275.576	1.1.01 Pajak Daerah	95,20	956.565.817
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	406.520.707		100	410.890.129
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	<i>100</i>	<i>74.640.000</i>		<i>100</i>	<i>74.640.000</i>
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	74.640.000		1	74.640.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	100	14.953.576		100	41.353.576
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda dan Luar Provinsi	1	14.953.576		1	41.353.576
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>		66	150.000.000		58	130.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Samarinda dan Luar Provinsi	10	150.000.000		11	130.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	1	255.099.248		1	259.468.670
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	4.010.274		4	4.010.274
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	57.774.633		4	55.774.633
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	69.212.244		4	69.392.244

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	11.802.097		4	19.291.519
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	1.980.000		12	1.980.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Samarinda dan Luar Provinsi	1	110.320.000		1	111.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	<i>3</i>	<i>794.141.459</i>		<i>3</i>	<i>794.141.459</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	6.000.000		1	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	145.421.459		1	145.421.459
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	642.720.000		1	642.720.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	<i>Samarinda</i>	<i>68,50</i>	<i>116.962.000</i>		<i>68,50</i>	<i>67.852.241</i>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	2	27.052.000		2	24.406.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	2	50.000.000		1	24.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	60	39.910.000		25	19.446.241
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	10 Kab/Kota di Kaltim	8.000.000	923.480.891	1.1.01 Pajak Daerah	8.000.000	755.489.554
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah benih bersertifikat yang beredar (benih)</i>	<i>10 Kab/Kota di Kaltim</i>	<i>7.000.000</i>	<i>812.922.441</i>		<i>7.000.000</i>	<i>668.932.059</i>
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	10 Kab/Kota di Kaltim, Kalimantan Utara	200	458.832.623		250	391.270.702
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	354.089.818		1	277.661.357

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)</i>	<i>Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara</i>	2	110.558.450		2	86.557.495
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara	1	110.558.450		1	86.557.495
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN				6.250.552.220			5.920.421.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		82,75	1.220.614.112	1.2.01.07Dana bagi Hasil (DBH)	85,75	934.276.500
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	529.938.108		100	486.144.600
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		100	96.240.000		100	96.240.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	96.240.000		1	96.240.000
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)</i>		100	1.113.500		100	1.003.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda	1	1.113.500		1	1.003.000
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		30	45.000.000		53	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Jawa Timur	6	45.000.000		11	15.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		1	297.354.708		1	253.561.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	11.028.783		4	9.085.366
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	83.438.639		4	48.884.470
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	40.177.936		4	31.795.325
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	25.101.350		4	18.523.740
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	3.960.000		12	3.878.400

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab/Kota dan Luar Daerah	1	133.648.000		1	141.393.899
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		2	43.001.852		10	25.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	9	43.001.852		17	25.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan (P2TP))</i>		3	877.223.400		4	877.223.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	5.200.000		1	5.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	1	227.383.400		1	227.383.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda, Loa Janan Kab. Kukar	1	644.640.000		1	644.640.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))</i>		60	390.618.760		60	152.393.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	Samarinda	1	17.036.000		1	16.031.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	341.541.760		1	106.391.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	10	32.041.000		40	29.971.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	10 Kabupaten/Kota	90	4.500.000.000	1.2.01.07 Dana bagi Hasil (DBH)	90	4.500.000.000
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)</i>	<i>10 Kabupaten/ Kota</i>	<i>67</i>	<i>4.500.000.000</i>		<i>30</i>	<i>4.500.000.000</i>
	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan aph (Pelaku Usaha)</i>	<i>Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kota Bontang</i>	<i>4</i>			<i>7</i>	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	10 Kab/Kota	2.840	4.500.000.000		1.200	4.500.000.000
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN				3.244.002.512			2.817.783.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		79,9	1.128.947.080	1.1.01 Pajak Daerah	78,25	872.620.400
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100	472.826.717		100	447.312.738
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		<i>100</i>	84.960.000		<i>100</i>	84.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	84.960.000		1	84.960.000
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		<i>100</i>	<i>17.400.000</i>		<i>100</i>	<i>17.400.000</i>
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	17.400.000		1	17.400.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		38	90.000.000		25	60.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Samarinda dan Luar Wilayah Prov Kaltim	6	90.000.000		4	60.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		1	311.240.517		1	242.312.738
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	7.168.774		4	7.168.774
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	112.375.166		4	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	4	42.180.000		4	43.875.244
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4	19.136.577		4	19.329.520
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	1.980.000		12	1.939.200

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab/Kota Se Kaltim dan Luar Wilayah Prov Kaltim	1	128.400.000		1	120.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		3	883.866.200		3	801.160.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	5.000.000		1	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	156.586.200		1	200.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	1	722.280.000		1	596.160.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%) (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>		68	214.307.080		68	114.100.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Samarinda	2	46.967.080		2	45.676.300

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBERDANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	3	120.000.000		3	39.174.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda, Km. 41 Kecamatan Loa Janan dan Km.29 Kecamatan Samboja	3	47.340.000		3	29.250.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)		3,32	1.642.228.715	1.1.01 Pajak Daerah	3,45	1.497.850.462
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu (Benih)</i>		<i>1.100.000</i>	<i>1.642.228.715</i>		<i>1.200.000</i>	<i>1.497.850.462</i>
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	20.000	1.642.228.715		15.000	1.497.850.462

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2026, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2026. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2026.

Sejalan dengan program unggulan Jospol yaitu hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan produksi sebagai bahan baku industri. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi Komoditas perkebunan untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktifitas tanam dengan cara : (1) penggunaan benih yang unggul dan bermutu (2) memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman (3) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha perkebunan (4) penanganan serangan OPT dan gangguan usaha lainnya dan (5) mengoptimalkan penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Kode	Organisasi	RKPD 2026 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	52.745.820.000
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	40.921.987.386
3..27.3.27.0.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2.329.277.388
3..27.3.27.0.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6.250.552.526
3..27.3.27.0.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3.244.002.700

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPA pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	269.014.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		293.898.752,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	42.392.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		28.370.612,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.785.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		1.562.760.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	88.710.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		88.710.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2	3	2	0	7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas perkebunan Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	-		20004096 Ton 13.33 %	3.686.927.115,00						-	16.654.387.568,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 laporan	27.223.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		27.223.950,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
						[Meningkatkan Luasan Areal Perkebunan]	Luas kebun yang dibangun	30050	52381	49000	44525	996.382.221,00							722.841.080,00	
	3	2	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian														
	3	2	0	1.0	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	143.003.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		193.033.500,00	DINAS PERKEBUNAN
						[Meningkatkan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani]	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani	100	0	0	12	996.382.221,00							722.841.080,00	
	3	2	0	1.0	001	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	27.235.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		27.235.731,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
							Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	69.145.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani		69.145.589,00	DINAS PERKEBUNAN
4	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan	-			100 %	1.509.943.943,00						-	7.806.607.623,00	
						[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan]	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan	100	100.28	100	100	1.509.943.943,00							7.806.607.623,00	
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi														
	3	2	0	1.0	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				95000 Ha	856.999.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		4.484.170.550,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
5	3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi	-			19.62 % 33.05 %	717.847.091,00						-	1.566.399.000,00		
						[Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan]															
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan	-			35 Pelaku Usaha 7 Pelaku Usaha	717.847.091,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.566.399.000,00		
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian															
						[Meningkatkan pelaku usaha perkebunan yang bersertifikasi berkelanjutan]	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	23.46	18.38	18.66	19.62	717.847.091,00								1.566.399.000,00	
6	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.548.374.833,00								2.454.549.280,00	
						[Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pekebun]						1.548.374.833,00								2.454.549.280,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	109.956.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan hillirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani dan Penyuluh		436.741.628,00	DINAS PERKEBUNAN	
						UPTD Pengawasan Benih Pekebunan														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.329.277.174,00							2.690.018.101,00		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.329.277.174,00							2.690.018.101,00		
7	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
						[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan)]	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	1.405.796.283,00						1.562.227.924,00		
							97.9	98.1	86.2	95										
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	-				100 %	14.953.576,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	-	2.565.220,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan					4 Paket	11.802.097,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		12.713.020,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		1.980.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	110.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		168.304.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	6.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan		4.830.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	354.089.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		440.231.677,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi														
	3	2	0	1.0	000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
						Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	110.558.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					6.250.552.220,00							3.473.737.613,00		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
9	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			82.75 Indeks 100 %	1.750.552.220,00						-	1.642.038.196,00	
						[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan)]														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			100 %	96.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	84.960.000,00		
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														2	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	96.240.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		84.960.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N	
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														4	
	3	2	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah															7
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			30 %	45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	78.000.000,00		
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															9
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	nit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-			1 Unit	297.354.708,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	371.591.528,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	133.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		249.504.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang													
						Urusan Pemerintah Daerah													
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	43.001.852,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		39.025.668,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	-		3 Jenis	877.223.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	963.127.000,00	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		5.200.000,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNA N

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	32.041.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		29.984.000,00		UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNAN
10	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
						[Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan]	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	90	90.62	90	90	4.500.000.000,00								1.831.699.417,00	
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyakan bio pestisida dan APH	-			67 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha	4.500.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.831.699.417,00		
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2840 Ha	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		1.831.699.417,00	UPTD PENGEMBA NGAN PERLINDUN GAN TANAMAN PERKEBUNAN	
						UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.244.002.512,00							3.175.774.704,00		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
11	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			100 % 79.90 Indeks	1.601.773.797,00							-	1.675.774.704,00	
						[Meningkatkan kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan)]															
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			100 %	84.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	84.960.000,00		
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		84.960.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	
						-															
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	-			100 %	17.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	49.927.263,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		4.630.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	156.586.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		210.120.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	722.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		744.600.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			68 %	214.307.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	-	154.184.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		7	1	9	2																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	46.967.080,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		45.684.700,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		7	1	9	9																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		50.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
		7	1	9	0																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	47.340.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan		58.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	-			3.32 %	1.642.228.715,00						-	1.500.000.000,00	
						[Terpuhinya Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu]	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD	3.83	3.22	3.19	3.32	1.642.228.715,00							1.500.000.000,00	
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu	-			1100000 Benih	1.642.228.715,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan	-	1.500.000.000,00	
	3	2	0	1.0	001	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				20000 Batang	1.642.228.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membang un Ekonomi Inklusif dan Berkelanju tan	Pelaku Usaha Perkebunan		1.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNA N

BAB V. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 Rancangan RKPD Tahun 2026. Renja 2026 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : disbun@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 000.7.2.6/571/Kpts-Disbun/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 termasuk capaian kemajuannya;
 2. Mempelajari sasaran serta tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Mengkaji peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Perubahannya jika diperlukan;
 7. Bertanggungjawab mulai proses penyusunan samapi proses akhir penyelesaian dan penyempurnaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Desember 2024

KEPALA,


Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19650309 199603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
000.7.2.6/571/Kpts-Disbun/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA TAHUN 2026 DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Ketua : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : JF Perencana Ahli Muda

Tim Penyusun : 1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
2. Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan
3. Kepala Bidang Usaha
4. Plt. Kepala Bidang Pengembangan Komoditi
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
6. Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
10. Pelaksana Lingkup Sekretariat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

KEPALA,


Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19650309 199603 1 004

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Prov. Kalimantan Timur telah dilaksanakan kesepakatan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 khususnya pengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pada **Sasaran 1 Terakselerasinya Perekonomian Daerah**, dihadiri oleh perangkat daerah dan pihak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
2. Penyampaian materi :
 - a. Penyampaian Output Utama Sektor Perkebunan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Perkebunan)
 - b. Penyampaian Output Utama Sektor Pariwisata dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pariwisata)
 - c. Penyampaian Output Utama DPPKUKM dalam mendukung LPE, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan serta Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)
 - d. Penyampaian Output Utama Sektor Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim)
 - e. Penyampaian Output Utama Sektor Peternakan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim)
 - f. Penyampaian Output Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim)
 - g. Penyampaian Output Utama Sektor Kehutanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)

- h. Penyampaian Output Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim)
 - i. Pengendalian Inflasi melalui Optimalisasi TPID (Kepala Biro Perekonomian)
 - j. Strategi memperkuat Daya Saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltim (Kepala BRIDA Prov. Kaltim)
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran Akselerasi Perekonomian Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran IV, maka pada:

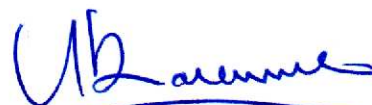
Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU :** Indikasi Program Prioritas dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA :** Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA :** Saran, masukkan dan koreksi forum lintas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT :** Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 April 2025
Pimpinan Sidang





Ir. Ujang Rachmad, M.Si

LAMPIRAN I**Penandatanganan Kesepakatan oleh Peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029****DPRD Provinsi Kalimantan Timur**

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur	


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi, M.Si	Kabid PSDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	
2	H. Warsito, ST	Sekretaris	Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim	
3	Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si.	Sekretaris	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	
4	Andi Siddik, SP, M.Ling	Plt. Kadis	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
5	Fahmi Himawan, S.T., M.T..	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	
6	H. Irhan Hukmaidly, S.Pi, MP	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	
7	H. Mohammad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.,	Sekretaris	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	
8	Herlina Eka Yanti, SE, M.Si	Adyatama Kepariwisataaan Ahli Muda	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	
10	H. Fahmi Prima Laksana, S.E.,MM.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim	
11			Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
12			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	
13			Dinas Sosial Prov. Kaltim	
14			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
15	Dr. M. Ir. Fitriansyah, ST, MM	Kepala Dinas	Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kaltim	
16	Anik Suhartatik, S.Sos	Kabag Kebijakan Perekonomian	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	

Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Dr. Achmad Zaini		Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	

Instansi Vertikal

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Bank Indonesia Wilayah Kaltim	
2	Ika Ayuningtyas	Statistisi Ahli Madya	BPS Provinsi Kalimantan Timur	
3	Ayat Nur Hidayat	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur	
4			Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur	

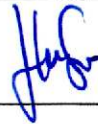
Unsur Akademisi

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	
2			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan	
3			Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepala Masyarakat UINSI Samarinda	

Unsur Asosiasi/Dunia Usaha

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1			Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim	
2			Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur	
3			Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Timur	
4			Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kaltim	
5			Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim	
6			Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kaltim	
7			Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim	
8			Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
9			Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim	
10			Himpunan Pramuwisata Indonesia Kaltim	
11			Komite Ekonomi Kreatif Kaltim	
12			Komite Daerah Ekonomi Syariah Kaltim	
13	Adung Karyo Sedio Utomo	Sekretaris	Himpunan Pengusaha Domba dan Kambing Indoensia Kaltim (HPDKI)	
14			Perhimpunan Inshan Perunggasan Rakyat (PINSAR)	
15			Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA)	
16	Kholid S	Ketua Bidang	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kaltim	
17			Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
18			PT. Kaltim Melati Bakti Satya	
19	Hasrun Jaya	Sekretaris	Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim	
20			Adipati Nusantara (Asosiasi UMKM)	
21	Jumri	Sekretaris	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kaltim (DEKOPINWIL)	

FORMAT LAMPIRAN II

**PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029**

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,

Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Kaltim					98.618.880.000		75.722.500.000		135.262.500.000		172.153.750.000		43.540.000.000		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Msi Dagang, fasilitasi promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih mencerminkan program prioritas peningkatan ekspor non migas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	- fasilitasi UKM potensial Ekspor	Dim PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (omset 2 15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	- Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM: 72.000 Penambahan 2% setiap tahun
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitasi Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi adalah menilai koperasi berkualitas Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	37,82	47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industri: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industri: 73,54 T
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain
2, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov, Kaltim					9.269.100.453		14.339.361.911		14.807.045.359		15.067.393.070		15.767.147.140		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	-4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1),Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan, 2),Gerakan Tanam/Panen, 3),Koordinasi dan Sinkronisasi 4),Monitoring dan Evaluasi, 1),Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura, 2),Sarana Pascapanen, 3),Sarana Pengolahan, 4),Data Produksi Hortikultura, 5),Registrasi Kebun Hortik 6),Monitoring dan Evaluasi,	
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	1.500.000.000	21.415,06	1.500.000.000	30.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	Perda / Perpub LP2B Kab/Kota	
3	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapastasya (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1),Pelatihan Teknis Pertanian, 2),Bimbingan Teknis Pertanian,	
3, Dinas Perkebunan Prov, Kaltim					17.097.004.856		19.551.893.730		21.544.467.753		23.766.629.479		26.271.007.317		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096		20.092.114		20.180.519		20.180.519		20.358.499	Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan		
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan(%)	n/a	16,67	15.853.350.076	33,33	19.174.990.230	50	21.167.564.253	66,67	23.389.725.979	83,33			25.894.103.817
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan	
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim				41.810.780.987		44.823.745.314		48.606.201.716		52.709.570.166		55.084.543.512			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Pengadaan Temak Sapi 2)Pengadaan Temak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur Luas HPT Unggul	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan penuntukan peternakan	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	*wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR *sapi betina yang dipotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar *produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) *Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infalasi/deflasi	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim				1287402000		1072000000		1199000000		1324000000		1456400000			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI 3. Penerbitan izin kapal	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	1)Bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. 2)Bimtek, pelatihan, sosialisasi teknis perikanan budidaya. 3)Pengembangan inovasi dan teknologi perikanan budidaya 4)Pembinaan sertifikasi CPB, CBIB dan monitoring penyakit ikan.	
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,00	154.233,40	1287402000	161.882,80	1072000000	169.977,00	1199000000	178.475,90	1324000000	1.877.399,70	1456400000	Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS)	
		Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647			

FORMAT LAMPIRAN III

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,

Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim				223.242.771.403		172.465.008.485		155.085.434.772		126.552.970.027		117.520.275.633			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	44	60	1.010.000.000	60	1.515.000.000	80	2.272.500.000	90	3.408.750.000	100	3.908.750.000	- Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Provinsi - Pengawasan Koperasi simpan pinjam	Jumlah koperasi setiap tahun bertambah Jumlah Koperasi Prov 2024: 160 koperasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitas Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi adalah menilai koperasi berkualitas/ Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	- Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM 72.000 Penambahan 2% setiap tahun
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	- fasilitas UKM potensial Ekspor	Dm PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (omset 2-15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	731.789.120	100	804.968.032	100	885.464.835	100	974.011.318	100	1.071.412.449	- Pelaku ekspor yg menggunakan SKA	Fasilitas SKA dan rekomendasi minuman beralkohol
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	21,4	57,1	25.000.000.000	71,5	50.000.000.000	85,7	30.000.000.000	92,84	1.000.000.000	100	1.000.000.000	- Pembangunan Pusat Distribusi Pangan	Kegiatan : Pembangunan 1 Pusat Distribusi Pangan yg rencana beroperasi th 2027 Tahun 2026 Pembangunan PDP dg usulan anggaran 17 M yg terdiri dari CAS (Controlled Atmosphere Storage), Gudang basah, Gudang kering dan kantor pengelola.
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Misi Dagang, fasilitas promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih mencerminkan program prioritas peningkatan ekspor non mgas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	4.763.323.821	100	5.001.490.012	100	5.251.564.512	100	5.429.507.281	100	5.789.849.875	- Pengawasan Barang dan Jasa - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Sosialisasi Konsumen Cerdas	Tahun 2024: 13 pengaduan, seluruhnya sdh ditindak lanjuti
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	75	80	1.150.380.000	83,3	1.454.079.384	86,6	1.757.778.768	91,6	2.061.478.152	100	2.365.177.536	- Monev Kerjasama antar daerah ke pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran - Fasilitas promosi produk UKM	Jumlah produk UMKM binaan yg masuk pasar 2024: 45 Jumlah produk UMKM yang bina 2024 : 60
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri (%)		47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industri: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industri : 73,54 T
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	1.400.000.000	100	1.440.000.000	100	1.480.000.000	100	1.520.000.000	100	1.520.000.000	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI, IPU, IUKI, IPKI kewenangan Provinsi	Melakukan verifikasi teknis perizinan industri besar PMDN (bukan industri strategis), IKM Intas Kab/Kota Tahun 2023 yang masuk: 8 KBLI ind besar Izin yg terbit tahun 2023 : 8 KBLI Diperindagkop hanya memben rekomendasi, sdgkan yang menerbitkan izin adalah DPMTSP

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat dan terkini (%)	40,32	56,44	1.000.000.000	64,5	1.060.000.000	72,56	1.120.000.000	80,62	1.180.000.000	88,68	1.180.000.000	-dieminasikan dan publikasi data informasi dan analisis industry provinsi melalui SINas	Tahun 2023 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 642 perusahaan Tahun 2024 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 901 perusahaan
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	74.236.313.322	89	75.254.469.982	89	78.681.704.973	89	89.922.557.460	89	85.500.000.000	-layan kesekretariatan -pengembangan kompetensi pegawai -pemenuhan sarana dan prasarana kantor -panganggaran -pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
UPTD BPSMB															
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	2.868.687.364	89	2945540000	89	2.935.340.000	89	3.407.340.000	89	3.534.000.000	-layan kesekretariatan -pengembangan kompetensi pegawai -pemenuhan sarana dan prasarana kantor -panganggaran -pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
16	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Mutu layanan UPTD BPSMB -Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	(A) 95,43 73,21	(A)95,53 74,21	3.016.000.000	95,58 74,71	3016000000	95,58 75,21	3.048.300.000	(A)95,68 75,71	3.017.045.000	(A)95,73 75,71	3.121.051.750	-layan sertifikasi dan kalibrasi -Pengujian Komoditi Potensial	BPSMB telah memiliki standar peyayanan (SP), berdasarkan hasil survey layanan ada beberapa kategori hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): A. Sangat Baik (88,31-100,00) B. Baik (76,61-88,30) C. Kurang Baik (65,00-76,60) D. Tidak Baik (25,00-64,99) -Perhitungan dilakukan dengan menguji sampel/komoditi potensial yang dilakukan oleh petugas. IKK yang mendekati angka 100 menunjukkan produk dan komoditi potensial yang ada di pasaran telah memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan.
UPTD PELATIHAN KOPERASI															
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Pelatihan Koperasi)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	6.099.397.776	89	6421000000	89	6.625.000.000	89	6.805.000.000	89	7000000000	-layan kesekretariatan -pengembangan kompetensi pegawai -pemenuhan sarana dan prasarana kantor -panganggaran	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
18	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (UPTD Pelatihan Koperasi)	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2	3	1.950.000.000	3,5	2.150.000.000	4	2.300.000.000	4,5	2.450.000.000	5	2550000000	-Fasilitas pelatihan bagi Koperasi dan UKM	Data 2024: Jml koperasi aktif: 2.900 Jml UKM: 72.000 Jml koperasi dan UKM yg dilatih sid 2024 : 1.511
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim					106.074.435.841		118.349.509.226		127.878.217.246		134.775.986.778		144.068.507.491		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Penggadaan Temak Sapi 2)Penggadaan Temak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur 5) Luas HPT Unggul	
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Kawasan dan agribisnis (Skor)	87,02	90,54	3.000.000.000	92,35	3.000.000.000	94,19	3.000.000.000	96,08	3.000.000.000	98,00	3.000.000.000		
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Temak dan Hijaun Pakan Temak (Skor)	81,02	85,95	3.680.000.000	88,53	4.085.000.000	91,18	4.270.000.000	93,92	5.050.000.000	96,74	5.190.000.000	-Populasi Temak/Hewan Yang dilakukan Perawatan -Sapi yang telah mendapatkan Surat Keterangan Layak Bbit -Produk Bbit/Benh HPT Yang Terdistribusi -Produk Hijaun Pakan Temak dan pakan olahan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan peruntukan peternakan	
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR sapi betina yang dipotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) -Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	93,35	94,28	3.000.000.000	94,75	4.000.000.000	95,23	4.600.000.000	95,70	4.600.000.000	96,18	5.500.000.000	-Alat Lab yang dikalibrasi tepat waktu -Penurunan kesalahan hasil uji -Sertifikat hasil uji lab yang tepat waktu	
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infalasi/deflasi	
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (skor)	83,59	86,96	600.000.000	88,70	600.000.000	90,48	600.000.000	92,28	600.000.000	94,13	600.000.000	RKS sektor peternakan sesuai dengan regulasi yang berlaku	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (Indeks)	91,65	92,57		93,03		93,50		93,56		94,43		Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (%)	100	100	41.624.106.403	100	45.623.786.604	100	49.849.939.357	100	54.470.615.107	100	59.113.696.368	Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (Indeks)	91,65	92,57		93,03		93,50		93,56		94,43		Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (%)	100	100	4.163.548.451	100	5.012.977.308	100	6.229.076.173	100	6.398.801.505	100	7.080.267.611	Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTHPT) (Indeks)	91,65	92,57		93,03		93,50		93,56		94,43		Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTHPT) (%)	100	100	8.196.000.000	100	11.204.000.000	100	10.723.000.000	100	7.947.000.000	100	8.500.000.000	Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)	
3. Dinas Perkebunan Prov. Kaltim					91.420.538.829		88.112.257.171		93.303.720.955		99.728.567.494		102.626.637.079		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096	15.853.350.076	20.092.114	19.174.990.230	20.180.519	21.167.564.253	20.180.519	23.389.725.979	20.358.499	25.894.103.817	Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan	
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan (%)	n/a	16,67		33,33		50		66,67		83,33		Peningkatan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Jumlah benih perkebunan yang dawasi peredarannya (benih)	12.460.941	8.000.000	1.497.548.748	8.000.000	1.777.303.708	8.000.000	2.395.034.089	8.000.000	2.093.464.249	8.000.000	1.931.010.674	Peningkatan pengawasan peredaran benih perkebunan	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	n/a	3,32	4.700.000.000	3,45	4.900.000.000	3,58	5.100.000.000	3,71	5.300.000.000	3,83	5.500.000.000	Pemenuhan ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan	
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbiasa dan terawasi (%)	n/a	33,05	3.398.203.798	49,64	3.327.854.014	66,19	3.337.954.707	83,09	3.347.487.815	100	3.410.487.815	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan	
		Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	18,38	19,62		20,58		21,54		22,5		23,46		Meningkatnya pelaku usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90,62	90	1.245.013.210	90	1.369.514.531	90	1.506.465.984	90	1.657.112.582	90	1.739.968.211	Pengendalian Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	n/a	100	4.940.068.743	100	5.790.678.179	100	6.669.978.179	100	9.387.876.295	100	11.160.648.135	Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Area Perkebunan	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Dinas Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95,77	95,09	38.160.073.674	95,21	39.304.875.884	95,33	40.484.022.160	95,42	41.698.542.825	95,51	42.949.499.110	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,1	97	1.745.074.000	97,3	1.832.327.700	97,6	1.923.944.085	97,9	2.020.141.289	97,9	2.121.148.354	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD P2TP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,8	95	1.822.937.800	95	1.914.084.690	95	2.009.788.925	95	2.110.278.371	95	2.215.792.289	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBTP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,4	97,5	16.814.614.000	97,8	8.343.724.735	97,8	8.332.065.073	98	8.347.034.589	98	5.327.075.174	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Perkebunan (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026		
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
4.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan			25.464.451.739		26.818.029.216		27.293.670.978		27.931.727.058		28.985.247.333			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100		100		100		100		100			
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi (skor)	89,10	89,95	1.676.918.602	90,40	1.677.930.656	90,85	1.680.940.000	91,31	1.682.150.000	91,77	1.686.165.000	1) Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi B2SA di Sekolah, Kampus, dan Pesantren di 10 Kab/Kota. 2) Rumah Pangan B2SA di 10 Kab/Kota. 3) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pengelolaan Pangan Lokal.	
		Skor PPH Ketersediaan (skor)	97,70	97,80	819.321.963	97,85	840.000.000	97,90	840.000.000	97,95	870.000.000	98,00	870.000.000	1) Gerakan Pangan Murah. 2) Rapat Pengendalian Inflasi. 3) Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan. 4) Pertemuan Evaluasi Harga Pangan. 5) Rapat Penyusunan NBM. 6) Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. 7) Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Pangan (%)	3,81	1,90	1.705.909.112	0,95	1.745.000.000	-	1.745.000.000	-	1.765.000.000	-	1.765.000.000	1) Rapat FSVA. 2) Penyusunan FSVA. 3) Koordinasi Pelaksanaan Pengalihan dan Penyaluran Cadangan Pangan. 4) Sosialisasi/Promosi/Edukasi Gerakan Selamatkan Pangan. 5) Penyusunan SKPG	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,20	87		87		87		87		87			
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	-4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1) Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan. 2) Gerakan Tanam/Panen. 3) Koordinasi dan Sinkronisasi 4) Monitoring dan Evaluasi.	
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140	1) Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura. 2) Sarana Pascapanen. 3) Sarana Pengolahan. 4) Data Produksi Hortikultura. 5) Registrasi Kebun Hortik. 6) Monitoring dan Evaluasi.	
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD BBI TPH)	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura (%)	48	53	1.289.017.817	55	1.417.919.599	60	1.559.711.558	65	1.715.682.714	70	1.887.250.986	Perbanyak benih sumber hortikultura	
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	36,31	100	741.381.922	100	815.520.114	100	897.072.125	100	986.779.338	100	1.085.457.271	Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PSBTPH)	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	98	100	5.120.314.425	100	1.655.356.501	100	1.390.281.501	100	1.424.421.501	100	1.457.246.501	Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PTPH)	Persentase Pengawasan Peredaran Pesticida dan Pupuk (%)	37	50		55		60		65		70			
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Pasarsana Pertanian	Cakupan Regulasi LP2B yang ditetapkan	4	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Perda / Perbup LP2B Kab/Kota	
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	74,5	90	3.545.621.855	90	2.932.301.855	90	2.978.981.855	90	3.025.661.855	90	3.072.341.855	1) Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2) Keji Terap Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 3) Surveillance OPT. 4) Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
11	Program Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1) Pelatihan Teknis Pertanian. 2) Bimbingan Teknis Pertanian.	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) (Indeks)	81,58	82,80	68.652.458.136	83,6	68.805.458.112	84,4	69.305.458.112	85,2	69.800.458.002	86	70.111.458.112	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) (%)	100	100	1.509.274.537	100	1.603.225.481	100	1.740.415.481	100	1.788.415.481	100	1.788.415.481	Penanganan keluhan pengguna layanan	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) (Indeks)	82	82,8	3.202.166.670	83,6	3.312.554.670	84,4	3.412.554.670	85,2	3.412.554.670	86	3.554.988.231	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) (%)	100	100	699.538.323	100	730.538.323	100	782.538.323	100	782.538.323	100	823.447.323	Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP) (Indeks)	81,58	82,8	3.399.004.379	83,6	3.470.004.442	84,4	3.570.004.442	85,2	3.570.004.442	86	3.666.935.442	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) (%)	100	100	429.589.446	100	470.558.661	100	520.558.661	100	520.558.661	100	570.558.661	Penanganan keluhan pengguna layanan	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH) (Indeks)	81,58	82,8	1.461.691.242	83,6	1.539.288.000	84,4	1.324.600.000	85,2	1.297.600.000	86	1.605.600.000	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH) (%)	100	100	407.534.332	100	443.850.000	100	465.100.000	100	493.700.000	100	509.200.000	Penanganan keluhan pengguna layanan	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) (Indeks)	81,58	82,8	3.387.716.051	83,6	3.405.525.051	84,4	3.480.665.849	85,2	3.480.665.849	86	3.530.443.521	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) (%)	100	100	847.350.170	100	899.421.170	100	939.651.170	100	939.651.170	100	989.651.170	Penanganan keluhan pengguna layanan	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	4.615.516.124	87,36	5.195.000.000	87,37	5.715.490.000	87,38	6.287.039.000	87,40	6.915.770.000	- Penataan Ruang Laut Kaltim berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTWP Kaltim yang ditetapkan - Pengebiban Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang efektif - Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terbentuknya Kolompok Penggiat Konservasi dan peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Pesisir	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3KRD/PS))	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	n/a	100,0		100,0	1.889.151.582	100,0	2.060.056.518	100,0	2.295.932.974	100,0	2.525.560.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	-Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan -Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI -Penerbitan izin kapal	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan (Ton)	561,0	583,7		595,3		607,2		619,4		631,8]		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	Bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. -Bmtek, pelatihan, sosialisasi teknis perikanan budidaya. -Peningkatan inovasi dan teknologi perikanan budidaya -Pembinaan sertifikasi CPiB, CBIB dan monitoring penyakit ikan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1.000.000.000	1.100.000.000	2.306.921.432	1.200.000.000	2.364.594.468	1.300.000.000	2.423.709.329	1.400.000.000	2.484.302.063	1.500.000.000	3.850.000.000		
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4.181.000	4.732.250	3.574.128.378	4.840.750	3.500.000.000	4.949.250	3.540.000.000	5.057.750	3.640.000.000	5.166.250	4.004.000.000		
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	100	100	3.395.771.880	100	2.196.466.203	100	2.251.377.858	100	2.307.662.305	100	2.416.150.000	-Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. -Berkurangnya pelanggaran ilegal fishing dan perusakan lingkungan -Terdokumentasinya kepatuhan melalui laporan pengawasan, catatan perizinan yang valid, dan pemenuhan standar operasional	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026	
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,0	154.233,4	1.287.402.000	161.882,8	1.072.000.000	169.977,0	1.199.000.000	178.475,9	1.324.000.000	187.399,7	1.456.400.000	-Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS) -Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS)		
		Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154.743	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647				
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (UPTD PMHP)	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	83	439.723.208	86	246.360.021	90	252.519.022	94	258.831.997	98	284.720.000			
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	50.642.283.312	92,6	75.563.968.000	92,8	85.670.715.900	93	96.764.056.695	93,2	98.540.490.000	-Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen berupa : DPA, RKA, RENUA, LKIP Proses APBD -Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa : 1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Pembayaran honor pengelola keuangan 3. Pelaksanaan kegiatan kepegawaian		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100				-Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Babi Benih Udang Santral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	943.023.830	92,6	966.599.426	92,8	990.764.411	93	1.015.533.522	93,2	1.117.100.000			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	1.519.027.525	100	1.557.003.213	100	1.595.928.293	100	1.635.826.501	100	1.799.450.000			
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	4.090.933.111	92,6	3.960.490.000	92,8	4.097.570.000	93	4.017.570.000	93,2	4.419.360.000			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	902.907.814	100	1.277.671.000	100	1.178.471.000	100	1.278.471.000	100	1.351.150.000			
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PMHP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	850.184.740	92,6	749.755.198	92,8	766.762.078	93	784.194.130	93,2	837.770.000			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	512.985.323	100	573.172.456	100	587.501.767	100	602.189.312	100	662.440.000			
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	2.890.370.500	92,8	3.649.296.013	93	3.202.861.288	93,2	354.297.000			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	1.548.476.796	100	1.607.188.695	100	1.668.368.338	100	1.835.240.000			
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil Kepulauan Derawan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	577.078.076	92,8	707.983.012	93	844.579.468	93,2	929.050.000			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	334.676.150	100	334.676.150	100	334.676.150,0	100	368.160.000			
6. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan						511.973.995.346		585.148.295.532		598.398.295.532		609.148.295.532		618.398.295.532		
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	6.293.432,95	6.402.024,00	47.478.300.186	6.461.888,27	47.478.300.186	6.525.929,11	47.478.300.186	6.594.146,54	47.478.300.186	6.665.844,44	47.478.300.186			
		2, Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1,545	1645	458.366.700	1695	458.366.700	1745	458.366.700	1795	458.366.700	1845	458.366.700			
		3, Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	1	3	2.000.000.000	4	3.000.000.000	5	4.000.000.000	6	5.000.000.000	7	6.000.000.000			
		4, Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	3,5	4,45	95.000.000.000	4,92	100.000.000.000	5,4	105.000.000.000	5,87	110.000.000.000	6,34	115.000.000.000			
		5, Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	0,16	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000			
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	0,54	4.200.000.000	547	5.000.000.000	555	5.500.000.000	562	6.000.000.000	569	6.500.000.000			
		2, Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan	N/A	95337	11.500.000.000	109140	12.500.000.000	115860	13.500.000.000	122580	14.500.000.000	132580	15.500.000.000			

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1500000000	3250000000	31854000000	3.500.000.000	45000000000	37.500.000.000	45000000000	4.000.000.000	45000000000	4.250.000.000	45000000000		
		2. Luas kawasan yang dikelola masyarakat	330184	370184	5.125.000.000	380184	5.375.000.000	390184	5.625.000.000	400184	5.875.000.000	410184	6.125.000.000		
		3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	3	1.500.000.000	4	3.000.000.000	5	3.000.000.000	6	4.500.000.000	7	4.500.000.000		
		4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10	12	37.500.000.000	12	39.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000		
4	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	19886	574628	4.000.000.000	767815	5.500.000.000	843695	7.000.000.000	948076	8.500.000.000	1286457	10.000.000.000		
		2. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,47	9.000.000.000	0,7	9.500.000.000	0,93	10.000.000.000	1,17	10.500.000.000	1,4	11.000.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	273.966.483.378	86,53	273.966.483.378	87,22	273.966.483.378	87,92	273.966.483.378	88,63	273.966.483.378		
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268		
7. Dinas Pariwisata Prov. Kaltim					58.425.780.129		60.820.899.003		65.705.200.800		67.270.708.824		69.350.882.089		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,69	2,69	8.625.000.000	3,19	9.050.000.000	4,01	9.475.000.000	4,51	9.900.000.000	5	10.325.000.000		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	28,56	29,1	7.350.000.000	29,74	7.700.000.000	30,13	9.000.000.000	30,68	9.450.000.000	31,09	12.650.000.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3,55	5,07	14.000.000.000	6,08	15.000.000.000	7,09	15.000.000.000	8,11	15.000.000.000	9,12	15.000.000.000		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0,82	1,08	6.000.000.000	1,1	6.500.000.000	1,2	7.000.000.000	1,3	8.000.000.000	1,4	8.500.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	82		83		84		85		85			
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	22.450.780.129	100	22.570.899.003	100	25.230.200.800	100	24.920.708.824	100	22.875.882.089		
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim					80.474.341.319		61.763.780.698		62.832.197.026		64.825.334.987		69.374.832.409		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang melakukan investasi besar (di atas 10 M) (Pelaku Usaha)	N/A	9	5.062.420.000	11	3.812.420.000	13	3.962.420.000	15	4.412.420.000	17	5.800.000.000	1. Penyusunan RUMPD Kaltim 2. Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi Kaltim 3. Pendampingan fasilitas hirisasi investasi strategis	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	N/A	2	3.592.268.904	2	3.535.559.715	2	3.889.115.686	2	4.278.027.254	3	4.500.000.000	1. Pameran investasi dalam & luar negeri 2. Forum investasi (MF, One on One Meeting) 3. Publikasi Promosi Digital	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	93	93,25	6.395.064.400	93,58	7.652.000.000	93,91	7.861.000.000	94,25	8.365.000.000	94,6	9.000.000.000	1. Penyediaan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan e-ptsp 2. Fasilitas penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha 3. Pemantauan lapangan pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan	
4	PROGRAM KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Penanaman Modal yang difasilitasi (Dokumen)	N/A	2	850.000.000	2	885.000.000	2	923.500.000	2	965.850.000	2	1.012.435.000	Pengembangan Kerjasama Intas sektoral (RIRU, BIMP-EAGA)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan PMPTSP yang Memanfaatkan Sistem Informasi (%)	64	82	1.200.000.300	86	1.400.000.000	91	1.300.000.000	95	1.550.000.000	96	1.650.000.000	Fasilitas penyediaan data informasi PMPTSP ke publik	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha (%)	100	100	2.999.100.513	100	2.521.603.574	100	2.678.763.931	100	2.841.640.324	100	3.000.000.000	1. Pengawasan pelaporan LKPM Pelaku Usaha 2. Press realese nilai investasi Kaltim 3. Fasilitas pendampingan dan penyelesaian permasalahan pelaporan LKPM	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	92	60.375.487.202	93	41.957.197.409	94	42.217.397.409	95	42.412.397.409	97	44.412.397.409		
9. BRIDA Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti (%)	65	67		70		70		72		73			
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65	67		70		70,50		75		80			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10	28,10		28,60		29		29,60		30			

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026		
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
11.	Biro Perencanaan Setda Prov. Kaltim			0		0		0		0		0			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BIRO PEREKONOMIAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perencanaan	81 Indeks	83 Indeks		84 Indeks		85 Indeks		86 Indeks		87 Indeks		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perencanaan	1)Pementauan Harga 2)Pemanfaatan data Harga dan Pealporan 3)Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan yang di fasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perencanaan	100 Persen 90 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan yang Mendorong Ekonomi yang berkualitas		
12.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov Kaltim			3.383.072.190.881		4.652.146.273.611		4.558.807.093.539		3.765.011.113.919		2.700.979.161.349			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ruas jalan baru yang dibangun (Ruas)	2	2	419.000.000.000	5	995.000.000.000	5	995.000.000.000	5	1.017.000.000.000	5	645.000.000.000	1. Pembangunan Jalan Teiring - Ujoh Blang 2. Pembangunan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kafara) 3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46 4. Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Sell - Jembatan Mahkota II) 5. Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek - Bongon	
		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)	83,77	90,77	1.132.000.000.000	100	1.140.000.000.000	100	500.000.000.000	100	500.000.000.000	100	500.000.000.000	1. Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kalarang - Bts. Berau 2. Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talsayan 3. Rekonstruksi Talsayan - Tanjung Redeb 4. Rekonstruksi Muara Badak - Bts. Bontang 5. Rekonstruksi Jalan Lainnya Menuju Kemantapan 100%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah litasi Kewenangan provinsi yang terlayani jaringan rigasi (Ha)	1.822	135	61.896.420.383	130	84.070.115.305	161	68.418.667.459	176	76.420.083.039	176	88.485.680.469	DI Biatan; DI Marangkayu; DI Labanan; DI Merancang; DI Kalarang; DI Selangkau; DI Rantau Pulung; DI Benganon; DIR Sebuti; DIR Tabalar Muara; DIR Rantau Pangan; DIR Sukan Tengah; DIR Tanjung Pengat; DIR Urutang; DIR Sei Kuran; DIR Suliran ; DIR Laburan Lama; DIR Padang Pangrapat; DIR Riwang; DIR Tanjung Au; DIR Tanjung Harapan; DIR Resak; DIR Datah Blang	
		Panjang pantai kritis yang dtangani (Km)	0,52	1,41	42.612.742.500	1,31	32.641.004.500	1,14	138.288.254.500	1,49	108.897.442.500	1,49	31.897.442.500	Pantai Manggar; Pantai Lamanu; Pantai Bontang; Pantai Mako Bimob; Pantai Tanjung Jumlai; Pantai Sabobang; Pantai Teluk Sulaiman; Pantai Maratua; Pantai Kenyamukan; Pantai Sekerat; Pantai Manubar; Pantai Kenunggan Besar	
		Kapasitas air baku untuk air bersih (L/dt)	875	260	159.700.000.000	60	156.200.000.000	60	121.200.000.000	60	91.500.000.000	60	91.500.000.000	Pemb. Sumur Dalam 10 Kab/Kota Pembangunan Unit Air Baku 10 Kab/Kota Pembangunan Bendung Sungai Sangatta	
		Penanganan luas genangan banjir perkotaan (Ha)	147	131	62.241.977.680	169	305.341.977.680	170	309.241.977.680	149	301.441.977.680	137	70.741.977.680	Sungai Karang Mumus; Sungai Karang Asam Besar ; Sungai Karang Asam Ked ; Sungai Bontang; Sungai Guntung; Sungai Tumbit; Sungai Makromen; Sungai Sembutan; Sungai Loa Janan; Sungai Tenggarong; Sungai Marangkayu; Sungai Mangkujenang; Sungai Bukuan; Sungai Ampat; Sungai Sangatta; Sungai di Teluk Pandan; Sungai Kenyamukan; Sungai Loa Haur; Sungai Labangka; Sungai Kandilo; Sungai Sesulu; Sungai Mahakam (Kubar); Sungai Mahakam (Mahulu)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani (%)	10,8	22,13	19.800.000.000	33,45	19.250.000.000	44,75	20.350.000.000	56,96	19.800.000.000	68,38	19.800.000.000	Pembangunan & Peningkatan Kapasitas Drainase Utama 10 Kab/Kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	23,4	36,5	111.854.029.600	48,7	309.230.920.000	73,4	1.055.789.727.000	90,3	945.729.630.000	100	691.971.540.000	1. SPAMI REGIONAL LONG KALI 2. SPAMI REGIONAL MHAKAM 3. SPAMI REGIONAL MARANGKAYU	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	10,2	15,6	4.115.938.640	24,5	61.586.847.900	38,9	21.586.847.900	67,8	201.986.847.900	90	201.486.847.900	1. SPALD REGIONAL SAMARINDA-KUKAR	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	13,5	30	1.055.496.147.200	50,56	1.209.769.504.026	71,75	999.625.027.200	87,41	172.978.197.200	100	75.555.299.200	1. RSJD ATMA HUSUDA MHAKAM (MAJOR) 2. GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN KALTIM EX TEMINDUNG (MAJOR) 3. GEDUNG KESWAN-KESMAVET KALTIM 4. KANTOR DINAS KESEHATAN KALTIM 5. KANTOR DINAS PERKEBUNAN KALTIM 6. KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KALTIM (EX BARISTAN) 7. KANTOR DINAS ESDM KALTIM 8. KANTOR BPBD KALTIM 9. GREEN BUILDING DINAS PUPR-PERA KALTIM 10. KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KALTIM 11. KANTOR DINAS KEHUTANAN KALTIM 12. KANTOR BPSDM KALTIM 13. KANTOR UPTD BPPSDM PERTANIAN KALTIM 14. KANTOR BIRO UNJUM - GEDUNG PPK KALTIM	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional (%)	5,4	9,2	1.403.853.740.00	15,5	1.559.200.000.00	31,3	20.400.000.000.00	67,6	52.790.000.000.00	90	67.790.000.000.00	1. TPA REGIONAL SAMARINDA-KUKAR (LOA JANAN ATAU TENGARONG SEBERANG)	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13.	Dinas Perhubungan Prov Kalimantan				74.299.655.651		277.000.135.433		170.187.701.363		172.055.596.363		158.302.181.363		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	29.023.782.060	78,3	28.955.705.538	78,7	29.205.705.538	79,07	28.955.705.538	79,44	29.055.705.538		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	4.901.966.380	100	6.625.606.025	100	5.583.995.825	100	5.780.890.825	100	6.052.475.825		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	155	10.692.384.016	145	71.140.823.870	135	71.120.000.000	125	79.105.000.000	115	85.980.000.000	1. Sosialisasi dan Evaluasi RAK LLAJ Prov. Kaltim 2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan (LPJU, Rambu, RPPJ, Marka, Paku Marka, Pagar Pengaman, Deliniator, CCTV) 3. Forum LLAJ; 4. Penegakan Hukum ODOL; 5. Rampcheck Angkutan AKDP; 6. Penyediaan Layanan Sarana Angkutan Umum Massal 7. Penyediaan Layanan Angkutan Perintis.	
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365,326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	*1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bontang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau*	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah distribusi penumpang melalui perubahan kewenangan provinsi (Orang)	100,365	118	24.003.567.595	127	31.400.000.000	136	31.400.000.000	145	26.400.000.000	154	26.400.000.000	*1. Rehabilitasi Demega Tereng, Kutai Barat; 2. DED Demega Speed depan Kir Gubemur 3. Kajian Pengelolaan Alur Sungai di Kalimantan Timur (Mahakam dan Segah) 4. Pembangunan Demega Speedboat di Depan kantor Gubemur	
		Jumlah distribusi barang melalui perubahan kewenangan provinsi (Kg)	19,312	23,4		25,4		27,4		29,5		31,5			
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	40	55	1.350.000.000	65	1.250.000.000	75	1.450.000.000	85	1.450.000.000	95	1.450.000.000	*1. Study FS Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 2. Study Kelayakan KPBu Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 3. Study SID Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 4. Study LARAP Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong 5. Study AMDAL Jaringan Kereta Api Rute Samarinda - Tenggarong*	
	UPTD Terminal														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76		78,3		78,7		79,07		79,44			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)													
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365,326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	*1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bontang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau*	
14.	Dinas Sosial Prov Kalimantan				0		0		0		0		0		
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	5000 orang	4500 orang		4500 orang		4000 orang		3500 orang		3500 orang			
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50%	60%		65%		70%		75%		80%			

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

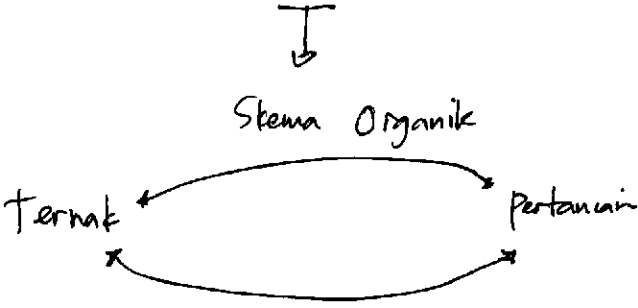
NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
Sudarno	Tim Transisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan tingkat inflasi penyumbang tersebar adalah pemasokan pangan, seharusnya terkait dengan pasokan pangan bisa lebih dijaga untuk standarisasi harganya. 2. Perlu adanya peningkatan produksi dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. 3. Perlu dilakukan pertemuan dengan pemasok dalam mengendalikan harga pangan.
Zaini	Tim Transisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menyelaraskan program gratispoll dan jospol untuk masuk ke perencanaan daerah, dan memastikan Perangkat Daerah mendukung program gratispoll dan jospol yang sdh disusun. 2. Kegiatan Perangkat Daerah dilingkup pertanian untuk Jospol 1 adalah mendukung hilirisasi, yang harus dipersiapkan adalah sisi hulunya yaitu dengan peningkatan produksi. Karena indikator kinerjanya adalah produktivitas. 3. Meningkatkan produksi perlu 2 hal yng dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas dan serta perluasan areal tanam, dimana untuk kegiatan Jospol belum ada memasukkan kegiatan tersebut, termasuk di dinas perkebunan tidak ada kegiatan untuk Jospol 1. 4. Dinas perindustrian perlu melaksanakan kegiatan terkait bagaimana cara melakukan pengembangan Kawasan-kawasan industry 5. Terkait dengan perikanan, untuk mendukung IBEI Berapa anggaran untuk peningkatan produksi ? jika bisa dioptimalkan sesuai dengan kewenangan provinsi. 6. TIPD Untuk dapat di proyeksikan berapa persen kemampuan dalam mengendalikan Inflasi. 7. BRIDA Perlu membuat Blue Print / Road Map untuk penelitian Daerah.
Anwar Saleh	Tim Transisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah batas kawasan hutan bisa smpai ke tingkat Tapak. 2. Pengembangan hutan rakyat dipastikan untuk dapat terdaftar dan memperoleh bantuan dari pemerintah. 8. pengelolaan DAS mahakam untuk transportasi publik perlu diperhatikan. dengan melakukan degradasi eks mahakam untuk mengurangi resiko bencana lingkungan
Ujang Rachmad	Asisten II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan untuk Peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis modern Tidak masuk ke dalam Jospol 1. 2. Pastikan program dan kegiatan perkebunan untuk memasukkan kegiatan prioritasnya ke dalam jospol. 3. Perangkat Daerah untuk dapat mengusulkan ke Bappeda yang masuk ke Jospol untuk kegiatan peningkatan Produksi. 4. Asosiasi/mitra pembangunan dapat berkunjung ke Perangkat Daerah terkait untuk melakukan Forum diskusi khusus.

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Perangkat daerah untuk dapat membuat usulan serta argumentasinya yang dimasukkan ke JOSPOL 1. 6. Perangkat daerah untuk Menyiapkan matriks usulan disertai anggaran. Dan disampaikan ke bappeda untuk dilakukan rapat koordinasi kembali membahas usulan tersebut.
Hasrun Jaya	GPEI	<ol style="list-style-type: none"> 1. keberlanjutan kualitas lahan Pertanian dan Perkebunan sebaiknya kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan, selain untuk mendukung kualitas hidup Masyarakat dengan mengkonsumsi hasil pangan (Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan) yang sehat. 2. Potensi Kaltim adalah lahan yang tidak digunakan. disarankan lahan tersebut bisa dibudidayakan untuk pertanian dan perkebunan. 3. Perlu di kembangkan skema pertanian organik. 4. Perlu dibuat skema bagaimana kebutuhan pasar diluar negeri agar bisa terpenuhi dan bagaimana transformasi energi bisa dilaksanakan. 5. Perlu dipikirkan kembali terkait penangkapan ikan, karena banyak nelayan yang menangkap ikan diluar wilayah kaltim dikarenakan perairan di kaltim kritis. 6. Perdagangan Kaltim akan meningkat jika komoditi dan manufaktur dikembangkan selagi PAD disektor Batubara dan migas masih besar, sehingga sektor yang bisa mensuplay kebutuhan sektor lainyang sangat minim 7. Produksi ikan dan potensi laut (hewani) akan meningkat jika Pemerintah aktif membangun Infrastruktur rekayasa habitat ikan/udang dll dilaut akibat kerusakan terumbu karang (aktifitas alur pelayaran, metode tangkap illegal-bom, racun, pukat, dll) dan lemahnya pengawasan dan penanganan dari aparat terkait (Penegakan hukum)
Adung	HPDKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kaltim kekurangan pasokan daging, blm adanya kawasan khusus peternakan serta tertinggalnya kelembagaan peternakan. 2. Ada Potensi peternakan domba untuk menggantikan komoditi Sapi. 3. Dilakukan evaluasi untuk komoditas sapi yang dijadikan major project oleh Dinas Peternakan apakah populasinya dari tahun ke tahun bertambah atau tidak. 4. Belum ada peraturan terkait perlindungan lahan peternakan. 5. Perlunya peningkatan SDM Peternakan yang di ikuti oleh keterjaminan penyerapan hasil. 6. Fokuskan pada pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat
Jumri	DEKOPINWIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di harapkan masuk dalam Renstra dan Renja yang dilampirkan target pembangunan. 2. Koperasi indo memiliki dokumen bisa digunakan sebagai masukan untuk dokumen RPJMD
Fahmi	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEK maloy tidak ada cantolan sub kegiatan sehingga untuk pembangunannya akan dilakukan dimana? Karena

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		<p>adanya kawasan industri sangat berpengaruh dalam peningkatan LPE</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait Pariwisata untuk dapat lebih dikembangkan kembali untuk meningkatkan investasi
Warsito	Disprindakop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi untuk kawasan industri adalah kariangau, kegiatan 2026 ada kajian perpres untuk buluminung pengadaan lahan seluas 8 Ha 2. Kawasan Kariangau tahun 2027 penyusunan DED, Amdal, dan andalalin
Fitriansyah	BRIDA	Geopark menjadi program nasional sehingga kaltim harus bisa mengikuti dan sudah disiapkan calon geopark di kaltim.
Ika Ayu	BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi kaltim tercatat sudah tinggi di posisi 8 PDRB Nasional 2. Perlu penambahan PDRB sebesar 50 T untuk bisa menambah pertumbuhan sampai 6% 3. Investasi kaltim saat ini yang mensupirt pertumbuhan ekonomi adalah IKN 4. Kaltim masih dominan di tambang. 5. Penurunan kontribusi tambang dikarenakan harga tambang yang turun. 6. Investasi di kaltim tinggi dipengaruhi oleh pembangunan di IKN
Daniel	IAP Kaltim	Perihal Belum ada kemantapan kesesuaian program utama antar OPD, yaitu korelasi kaltim sebagai lokasi nasional hirilisasi berbagai komoditi (kelapa sawit, Kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauskit, tembaga) dengan pembangunan serta pengelolaan kawasan industri di Kaltim dan program insentif investasi di bidang-bidang tersebut (untuk Jospol 1 dan 2). Dan Juga perlu keselarasan lokasi industri, program pengurai penghambat pengembangan kawasan industri dan turunannya dengan kesesuaian ruang.
KTNA	KTNA Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam paparan OPD Pertanian dan Perikanan belum ada Indikator Renstra perangkat Daerah dalam meningkatkan produktivitas 2. Perlunya inovasi dihulu dan dihilir untuk pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kaltim

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Hasrun Jaya	GPEI Kaltim	<p>- Keberlanjutan kualitas lahan pertanian & perkebunan sbaitx kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan. Selain untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dgn meng konsumsi hasil pangan (pertanian , peternakan , perkebunan) yang sehat .</p> <p>" Sesubur apapun tanah kita , jika tiap tahun diberi pupuk kimia , maka kualitas tanah kita akan sangat kritis "</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD SO[Skema Organik] --> T[Ternak] SO --> P[Pertanian] T --> P P --> T </pre> </div> <p>- Best business ^{low} perdagangan kaltim akan meningkat jika komodite dan manufaktur dikembangkan , "mumpang" PAD disektor batubara , migas masih besar sebagai sektor yang bisa mensuplay kebutuhan sektor lain yang sangat mltim .</p> <p>- produksi ikan dan potensi laut (hewan). akan meningkat jika pemerintah aktif membangun infrastruktur rekayasa habitat ikan / udang dll dilaut akibat kerusakan Terumbu karang (aktifitas Alur pelayaran, metode tangkap ilegal - Bom , Racun , pukat dll)</p>

dan lemahnya pengawasan dan penanganan . dari Aparat terkait . (kepastian hukum & penegakan hukum) .

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	JUMRI	DEKOPINWIL KALTIM	<p>Untuk Rencana Strategis Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu masukan untuk Penyempurnaan Rencma & Kerja Penanganan Kalimantan Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2) Inpres no 9 tahun 2025 mengenai Pemberian Koperasi Manah Putih dibarengkan manah dalam Rencma & Kerja yg dibarengkan tugas Penanganan, ulayuh, yg adat, budaya dan Berkeadilan ✓ 3) Hesi-hesi manahes Subjalen yg tidak bisa Masyarakat Kalimantan Timur ini dapat digubhkan. Para tidak adat dari Masyarakat Kalimantan Timur 4) Perubahan Nilai tukar Petani (NTP) Faktorology Strong → pamanfakti yg diluar lusaan bagi Masyarakat. <p>f.s → Danig v.</p>

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Adungks Utomo	HPDKI Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokuskan pd pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yg lebih mudah di kembangkan dan lebih me-nyantun langsung pd masyarakat. 2. Pemigkatan SDM peternakan harus di barengi dg keterjimian penyerapan hasil.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur telah dilaksanakan kesepakatan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 khususnya pengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pada **Sasaran 4 Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan**, dihadiri oleh perangkat daerah dan pihak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim)
2. Penyampaian materi :
 - a. Penyampaian Output Utama untuk peningkatan Kawasan Konservasi Perairan dan Kontribusi PDRB Perikanan Mendukung Ekonomi Biru (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim)
 - b. Penyampaian Output Utama untuk Peningkatan Kontribusi Lapangan Kerja Sektor Perikanan Mendukung Ekonomi Biru dan Produktivitas tenaga kerja sektor industri dan Jasa untuk Mendukung Ekonomi hijau (Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim)
 - c. Penyampaian Output Utama Produktivitas Padi untuk Mendukung Ekonomi Hijau, Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan Daerah dari aspek ketersediaan, dan Pencapaian Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim)
 - d. Penyampaian Output Utama untuk mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dan Pencapaian Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim)
 - e. Penyampaian Output Utama untuk mendukung Pencapaian Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)
 - f. Penyampaian Output Utama untuk mendukung Pencapaian Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan (Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)
 - g. Penyampaian Output Utama untuk mendukung Pencapaian Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim)

- h. Penyampaian Output Utama untuk mendukung Pencapaian Target Indeks Risiko Bencana (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim)
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran 4 Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV, maka pada:

Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU :** Indikasi Program Prioritas dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA :** Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA :** Saran, masukan dan koreksi forum lintas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT :** Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 April 2025
Pimpinan sidang




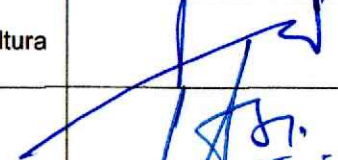









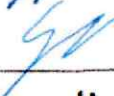



(Anwar Sanusi, S.Pd., M. Pd)

LAMPIRAN I**Penandatanganan Kesepakatan oleh Peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029****DPRD Provinsi Kalimantan Timur**

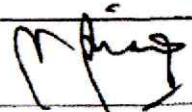
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1			Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur	

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur


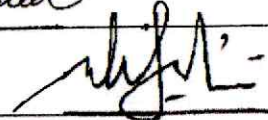
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi., M. Si.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	H. Irhan Hukmaidly, S.Pi, MP	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	Aji Syahdu Gagah Citra, S,Sos., M. Hum.	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4	Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si.	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
5	Anwar Sanusi, S.Pd., M. Pd	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Joko Istanto, S. P., M. Si.	Kepala Dinas	Dinas Kehutanan	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
7	Andi Siddik, SP, M.Ling	Plt. Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	
8	Hadi Suwito, S.E.	Sekretaris	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
9	Yasir, S.E., M. Si.	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10	Fahmi Himawan, S.T., M.T.	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
11	Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si.	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	
12	Stella Felicia Sinaga, S.Si., M.UrbanPlanDes	Kasubbag. Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
13	Denny Ruliansyah	Plt. Kabid. Aplikasi dan Informatika (Aptika)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Achmad Rasyid	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
15	Charmarijaty, S.T., M. Si.	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	


Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Franxisca Mariani	Infrastruktur	Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	


Unsur Instansi Kab/Kota

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Ade Rianto Embongbulan, ST. M.Ling	Sekretaris	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kab. PPU	
2	Ali Sadikin	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat	

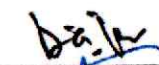
Unsur Instansi Vertikal

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Riza A. W.	Kepala Stasiun	BMKG Prov. Kaltim	

Unsur Akademisi

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Dr. Ir. Fahrunsyah, M.P.	Dekan	Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	

Unsur Mitra Pembangunan

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Fajar Lizmawan	Advisor	GIZ IKI JET Kaltim	
2	Dyah Catur	Sr. Officer	GGGI Kaltim	
3			DDPI Kaltim	
4	Dina Riska		Yayasan Konservasi Alam Nusantara	
5	Charmarijaty, S.T., M. Si.	Ketua	Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kaltim	
6	Dzul kifli		GIZ Propheat	

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

Mengetahui,
Kepala Bidang Perekonomian & SDA
Provinsi Kalimantan Timur

Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi, M.Si
NIP. 19710414 200212 1 005

Samarinda, 18 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Perkebunan

Andi Siddik, S.P., M.Ling
NIP. 19710518 200003 1 003



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

EMAIL : disbun_kaltim@yahoo.com & disbunkaltim@gmail.com